

ANALISIS POLA PANGAN HARAPAN
KONSUMSI PANGAN PENDUDUK
KABUPATEN BOGOR



Disusun Oleh

YAYAT HERYATN, SP, MPS

DEPARTEMEN GIZI MASYARAKAT

FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA - INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2023

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kuantitas dan kualitas konsumsi pangan penduduk di suatu wilayah merupakan pondasi ketahanan pangan yang harus selalu dipantau secara rutin oleh instansi pemerintah yang membidangi pembangunan ketahanan pangan, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Oleh karena itu, perkembangan konsumsi pangan penduduk di suatu wilayah merupakan salah satu indikator kinerja bidang ketahanan pangan, sekaligus mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan urusan wajib bidang ketahanan pangan oleh pemerintah daerah. Kegiatan monitoring dan evaluasi dalam bentuk analisis situasi konsumsi pangan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tentang kuantitas dan kualitas konsumsi pangan penduduk.

Dalam rangka mewujudkan upaya tersebut di atas, pada tahun anggaran 2022, Dinas Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Bogor secara khusus telah melaksanakan kegiatan Analisis Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Penduduk Kabupaten Bogor. Informasi yang diperoleh diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan ketahanan pangan, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan wilayah menuju pencapaian kinerja pembangunan bidang ketahanan pangan.

Secara umum tujuan kajian ini adalah menganalisis situasi dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk dengan pendekatan Pola Pangan Harapan berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional di wilayah Kabupaten Bogor. Secara lebih khusus kajian ini bertujuan untuk: 1). Menganalisis situasi konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Bogor berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH); dan 2). Menganalisis

estimasi pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Bogor.

Data pokok yang digunakan adalah data sekunder dari Badan Pusat Statistik, yaitu data konsumsi pangan penduduk hasil Susenas serta data jumlah penduduk Kabupaten Bogor tahun 2021. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan Program Aplikasi Harmonisasi Analisis Pola Pangan Harapan Berdasarkan Data Susenas yang dikembangkan oleh Tim Harmonisasi PPH Nasional atas kerjasama Badan Ketahanan Pangan (BKP), Kementerian Pertanian dengan Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.

Secara umum kuantitas konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Bogor berdasarkan volume atau berat pangan yang dikonsumsi masih kurang dari estimasi ideal konsumsi pada sebagian besar kelompok pangan kecuali pada kelompok padi-padian, minyak & lemak, dan lain-lain. Namun demikian total asupan energi konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Bogor tahun 2021 mencapai 2.128 kkal/kapita/hari (101,3 %AKE). Adapun total asupan protein konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Bogor pada Tahun 2021 mencapai 59,5 gram/kapita/hari (104,4 %AKP). Hal ini berarti bahwa secara kuantitas konsumsi pangan penduduk di Wilayah Kabupaten Bogor sudah cukup baik yang ditunjukkan oleh tingkat kecukupan energi dan protein yang sudah lebih dari 100%.

Meskipun secara kuantitas konsumsi pangan sudah melebihi kecukupannya, namun secara kualitas konsumsi pangan penduduk Kabupaten Bogor tahun 2021 baru mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 80,6 yang berarti masih jauh dari skor PPH ideal sebesar 100.

Hasil analisis terhadap data konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Bogor berdasarkan data Susenas Tahun 2021 menunjukkan bahwa realisasi pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Bogor belum optimal. Kelompok pangan yang pemenuhan kebutuhan konsumsinya melebihi idealnya berdasarkan Pola Pangan Harapan hanyalah padi-padian (124,9 kg/kapita), minyak & lemak (10,5 kg/kapita), dan kelompok lain-lain (24,9 kg/kapita) per tahun. Sementara kelompok umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, sayur dan buah, dan lain-lain belum mampu memenuhi estimasi idealnya. Untuk mencapai estimasi ideal kebutuhan konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Bogor pada tahun 2021 masih diperlukan tambahan pangan kelompok umbi-umbian (18,4 kg/kapita/tahun), pangan hewani (17,8 kg/kapita), buah/biji berminyak (3,7 kg/kapita), kacang-kacangan (4,4 kg/kapita), gula (7,6 kg/kapita), serta sayur dan buah (13,8 kg/kapita) per tahun.

Estimasi kebutuhan konsumsi pangan wilayah tahun tertentu dihitung berdasarkan perkalian rata-rata kebutuhan konsumsi pangan (kg/kapita/tahun) dengan jumlah penduduk tahun yang sama. Oleh karena itu, realisasi pemenuhan kebutuhan pangan wilayah di Kabupaten Bogor tahun 2021 menunjukkan pola yang sama dengan capaian pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan penduduk perkapita pada tahun yang sama. Kelompok pangan yang realisasi pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan wilayahnya telah melebihi estimasi idealnya berdasarkan Pola Pangan Harapan hanyalah kelompok padi-padian (685,8 ribu ton), minyak dan lemak (72,2 ribu ton), dan kelompok pangan lain (171,3 ribu ton) per tahun. Untuk dapat mencapai estimasi ideal kebutuhan konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Bogor pada masih diperlukan tambahan pangan kelompok umbi-umbian (101,1 ribu ton), pangan hewani (97,5 ribu ton), buah/biji berminyak (20,1 ribu ton), kacang-

kacangan (24,0 ribu ton), gula (41,5), serta sayur dan buah (75,7 ribu ton) per tahun.

Secara umum, hasil kajian Analisis Capaian Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan Penduduk Kabupaten Bogor Tahun 2021 ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi capaian kinerja pembangunan bidang ketahanan pangan, khususnya dalam upaya perbaikan pola konsumsi dan pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Bogor. Dengan dukungan data dan informasi dari hasil kajian ini diharapkan sinergisitas kebijakan, strategi dan prioritas pembangunan ketahanan pangan, khususnya di bidang konsumsi pangan, di wilayah Kabupaten Bogor dapat lebih dioptimalkan. Informasi dasar tentang capaian situasi dan estimasi kebutuhan konsumsi pangan penduduk diharapkan dapat dimanfaatkan oleh semua stakeholder terkait pembangunan ketahanan pangan di Wilayah Kabupaten Bogor pada setiap tahapan dan proses pembangunan baik tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Perlu dipahami bahwa estimasi kebutuhan konsumsi pangan hasil analisis dalam kajian ini baru mempertimbangkan kebutuhan pangan untuk konsumsi penduduk di tingkat rumahtangga, sehingga untuk menghitung kebutuhan konsumsi pangan secara keseluruhan perlu ditambah dengan estimasi konsumsi pangan penduduk di luar rumahtangga, khususnya di rumahsakit, hotel dan restoran, lembaga pemasyarakatan, lembaga pendidikan, dan sebagainya. Selain itu, untuk mengestimasi lebih jauh tentang total kebutuhan pangan wilayah harus pula mempertimbangkan kebutuhan pangan wilayah untuk non konsumsi penduduk, seperti : industri, energi alternatif, dan lain-lain. Dengan demikian, analisis tentang kebutuhan pangan akan lebih komprehensif, sehingga dapat mencakup kebutuhan pangan untuk konsumsi penduduk maupun untuk kebutuhan lainnya.

Agar hasil kajian tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dasar pembangunan ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Bogor, maka perlu disinergiskan dengan analisis ketersediaan pangan wilayah. Berdasarkan hasil analisis awal tentang capaian pola konsumsi dan pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan serta ketersediaan pangan wilayah tersebut, maka dapat dilakukan kajian lebih lanjut tentang analisis penyediaan pangan wilayah. Pada analisis tahap ini fokus kajian sudah mensinergiskan antara kebutuhan dan ketersediaan pangan dengan potensi dan daya dukung wilayah, baik potensi agroekologi maupun sosial ekonomi. Selain itu, alangkah lebih baiknya jika dapat kajian mendalam pada sisi preferensi pangan masyarakat untuk menggali lebih jauh berbagai faktor determinan berperan dalam membentuk pola konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Bogor. Dengan demikian, diharapkan dapat disusun berbagai strategi dan alternatif program ketahanan pangan yang efektif dan efisien pada berbagai tingkat sasaran mulai dari tingkat individu, rumah tangga dan lembaga maupun wilayah.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kajian Analisis Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Penduduk Kabupaten Bogor dapat diselesaikan sesuai dengan rencana. Kegiatan ini merupakan salah satu tindak lanjut kegiatan Bimbingan Teknis Analisis Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Penduduk yang diselenggarakan secara rutin di tingkat pusat maupun provinsi.

Situasi konsumsi pangan penduduk dapat dilihat dari ukuran kuantitas maupun kualitas konsumsi pangan Bogor berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH) yang menggambarkan pencapaian kinerja pembangunan dalam penganekaragaman konsumsi pangan. Hasil kajian ini diharapkan dapat memeberikan gambaran tentang capaian Tingkat Kecukupan Energi (TKE), Tingkat Kecukupan Protein (TKP), dan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Bogor.

Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Organisasi Perangkat Daerah terkait Ketahanan Pangan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor, serta semua pihak yang bekerjasama dalam pelaksanaan kegiatan ini, khususnya Badan Pusat Statistik dan Badan Pangan Nasional.

Bogor, Agustus 2023

Penyusun
Yayat Heryatno
Departemen Gizi Masyarakat
FEMA - IPB

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF.....	i
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Analisis	3
C. Kegunaan Analisis.....	3
II. TINJAUAN PUSTAKA	4
A. Landasan Hukum dan Kebijakan	4
B. Landasan Teoritis dan Metodologis	11
C. Definisi Atau Batasan Istilah	16
III. METODE ANALISIS	18
A. Desain dan Waktu Analisis.....	18
B. Sumber dan Jenis Data Analisis	19
C. Pengolahan dan Analisis Data	19
IV. KEADAAN UMUM WILAYAH KABUPATEN BOGOR	24
A. Geografi dan Agroekologi	24
B. Demografi dan Ekonomi	29
V. ANALISIS SITUASI KONSUMSI PANGAN PENDUDUK	32
A. Pola Konsumsi Pangan Penduduk.....	32
B. Konsumsi dan Kecukupan Gizi	33
C. Skor Pola Pangan Harapan (PPH).....	38
D. Gap Situasi Konsumsi Pangan	39
VI. ANALISIS KEBUTUHAN KONSUMSI PANGAN.....	43
A. Kebutuhan Konsumsi Pangan Penduduk	43
B. Kebutuhan Konsumsi Pangan Wilayah.....	44
VII. KESIMPULAN DAN SARAN	46
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN	51

DAFTAR TABEL

Tabel II.B.1.	Perbandingan Beberapa Standar Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ideal	14
Tabel II.B.2.	Susunan PPH Ideal dan Estimasi Berat Konsumsi Pangan Berdasarkan Standar Ideal Nasional	15
Tabel III.B.1.	Jenis dan Sumber Data Pokok Analisis Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Penduduk Kabupaten Bogor	19
Tabel V.A.1.	Situasi Pola Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2021.	32
Tabel V.B.1.	Kontribusi Energi Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2021.....	34
Tabel V.B.2.	Kontribusi Protein Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2021.....	35
Tabel V.B.3.	Capaian Kecukupan Energi dan Protein Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2021.....	36
Tabel V.C.1.	Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2021	38
Tabel V.D.1.	Gap Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2021..	40
Tabel V.D.2.	Gap Kontribusi Kecukupan Energi Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2021..	40
Tabel V.D.3.	Gap Kuantitas Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2021	42
Tabel VI.A.1.	Estimasi Kebutuhan Konsumsi Pangan Per Kapita Penduduk di Kabupaten Bogor Tahun 2021	43
Tabel VI.B.1.	Estimasi Kebutuhan Konsumsi Pangan Penduduk Per Tahun di Kabupaten Bogor Tahun 2021	45

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan adalah kebutuhan dasar hayati manusia yang paling utama, karena itu pemenuhan kebutuhan pangan merupakan bagian dari hak azasi individu. Selain itu juga pangan memegang peranan yang paling penting dalam rangka pembentukan sumberdaya manusia yang berkualitas, sehat dan produktif. Mengingat pentingnya hal ini, setiap negara akan mendahulukan pembangunan ketahanan pangannya sebagai fondasi bagi pembangunan sektor-sektor lainnya.

Program peningkatan ketahanan pangan merupakan prioritas utama dalam pembangunan di Indonesia. Pencapaian ketahanan pangan nasional yang diawali dengan perwujudan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Negara atau wilayah dapat dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik jika mampu menyelenggarakan pasokan pangan yang stabil dan masing-masing rumah tangga mampu memperoleh pangan sesuai kebutuhannya. Dengan demikian, terdapat suatu jaminan bagi seluruh penduduk untuk memperoleh pangan dan gizi yang cukup untuk menghasilkan generasi yang sehat dan cerdas.

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (Undang-undang Pangan Nomor 18 Tahun 2004). Oleh karena itu, bidang ketahanan pangan menjadi salah satu urusan wajib pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Tujuan pembangunan ketahanan pangan adalah menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan

bergizi seimbang baik pada tingkat nasional, daerah hingga rumahtangga. Ketahanan pangan harus diwujudkan secara merata di seluruh wilayah sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal. Ketahanan pangan terwujud apabila telah memenuhi dua aspek sekaligus. Pertama, tersedianya pangan yang cukup dan merata untuk seluruh penduduk. Kedua, setiap penduduk mempunyai akses fisik dan ekonomi terhadap pangan untuk memenuhi kecukupan gizi guna menjalani kehidupan yang sehat dan produktif.

Permasalahan pokok terkait ketahanan pangan di tingkat rumahtangga yang memegang peranan penting adalah aspek pola konsumsi pangan masyarakat. Beberapa permasalahan konsumsi pangan antara lain adalah: (a) Besarnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran dengan daya beli pangan yang rendah, (b) Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap diversifikasi konsumsi pangan dan gizi, (c) Masih dominannya konsumsi energi yang berasal dari beras dan (d) Rendahnya kesadaran dalam penerapan sistem sanitasi dan higienis serta keamanan pangan.

Salah satu jenis pelayanan dasar bidang ketahanan pangan adalah penganekaragaman konsumsi pangan. Perkembangan konsumsi pangan penduduk merupakan salah satu indikator kinerja bidang ketahanan pangan, sekaligus mencerminkan keberhasilan urusan wajib bidang ketahanan pangan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Oleh karena itu, konsumsi pangan penduduk merupakan pondasi ketahanan pangan yang harus selalu dipantau secara rutin oleh unit kerja ketahanan pangan, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Kegiatan monitoring dan evaluasi dalam bentuk analisis perkembangan situasi konsumsi pangan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tentang kuantitas dan kualitas konsumsi pangan penduduk. Pada gilirannya, informasi tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan kebijakan dan perencanaan konsumsi dan kebutuhan pangan penduduk.

Dalam rangka mewujudkan upaya di atas, pada tahun anggaran 2022, Dinas Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Bogor secara khusus telah melaksanakan kegiatan Analisis Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Penduduk Kabupaten Bogor . Informasi yang diperoleh diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam evaluasi capaian kinerja pembangunan bidang ketahanan pangan, khususnya dalam upaya perbaikan pola konsumsi dan pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Bogor.

B. Tujuan Analisis

Secara umum tujuan kajian ini adalah menganalisis situasi dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk dengan pendekatan Pola Pangan Harapan berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional di wilayah Kabupaten Bogor. Secara lebih khusus kajian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis situasi konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Bogor berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH).
2. Menganalisis estimasi pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Bogor.

C. Kegunaan Analisis

Tersedianya informasi tentang situasi dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Bogor berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH) sebagai bahan evaluasi capaian kinerja pembangunan bidang ketahanan pangan, khususnya dalam upaya perbaikan pola konsumsi dan pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Bogor.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Hukum dan Kebijakan

Perencanaan pembangunan tidak dapat terlepas dari aspek hukum dan kebijakan pembangunan. Aspek hukum menentukan hal-hal pokok seperti dasar hukum yang mengamanatkan suatu kegiatan perencanaan, aturan bagaimana dan oleh siapa perencanaan itu dilakukan atau proses administrasinya, bagaimana legalitas suatu proses pembangunan. Aspek kebijakan pembangunan yang erat kaitannya dengan birokrasi, sangat menentukan efektifitas dan efisiensi dari kegiatan perencanaan pembangunan. Bahkan lebih dari itu, kebijakan pembangunan sangat berpengaruh pada operasionalisasi dan keberhasilan implementasi suatu program pembangunan.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sementara pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Dengan demikian perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang dilaksanakan untuk 20 tahun, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dilaksanakan selama 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode satu tahun. RPJPD disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), sedangkan RPJMD merupakan penjabaran dari RPJPD. RPJMD disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sementara itu, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD yang disusun selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Renstra (Rencana Strategis) SKPD disusun berpedoman pada RPJMD. Renja (Rencana Kerja) SKPD merupakan penjabaran dari Renstra. Renja SKPD disusun berpedoman pada RKPD. RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) SKPD merupakan penjabaran dari Renja SKPD. RKA SKPD dikompilasi menjadi RAPBD. DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SKPD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran setelah APBD disetujui. DPA disusun berdasarkan penjabaran APBD untuk setiap SKPD.

Beberapa produk hukum dan kebijakan yang menjadi dasar pertimbangan dalam kajian atau analisis terkait pembangunan ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Bogor antara lain adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5860);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 Tentang Dewan Ketahanan Pangan;
10. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;

11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) 2017-2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2012 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.010/08/2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1329);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 956);

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 I - 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 200 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 69); dan

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 06 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 6).

Pemenuhan pangan dasar bagi masyarakat juga amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pangan. Pemenuhan hak dasar atas pangan dicerminkan pada definisi ketahanan pangan yaitu kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan nasional. Mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan merupakan hal mendasar yang sangat besar arti dan manfaatnya untuk mendukung pelaksanaan kebijakan terkait penyelenggaraan pangan secara nasional.

Lebih jauh undang-undang tersebut menjelaskan bahwa: 1) Pasal 60 Ayat 1: Pemerintah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif, dan produktif; 2) Pasal 60 Ayat 2: Penganekaragaman konsumsi pangan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman serta sesuai dengan potensi dan kearifan lokal; Pasal 62 : Tercapainya penganekaragaman konsumsi

Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 diukur melalui pencapaian nilai komposisi pola pangan dan gizi seimbang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa penyelenggaraan ketahanan pangan di kabupaten/kota mencakup 4 urusan dan 9 sub-urusan, yaitu: 1), Penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemadirian (urusan kabupaten/kota adalah penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota); 2). Penyelenggaraan ketahanan pangan urusan kabupaten/kota adalah : a) penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, b) pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota, c) penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, d) pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi); 3). Penanganan kerawanan pangan (urusan kabupaten/kota adalah: a) penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan, b) penanganan kerawanan pangan, c) pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan); (4) Keamanan pangan (urusan kabupaten/kota adalah pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar).

Penganekaragaman konsumsi pangan penduduk termasuk kedalam salah satu jenis pelayanan dasar pembangunan bidang ketahanan pangan. Oleh karena itu, perkembangan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan penduduk merupakan salah satu indikator kinerja bidang ketahanan pangan, sekaligus mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan urusan wajib bidang ketahanan pangan oleh pemerintah kabupaten/kota. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengatur secara lebih detail terkait dengan hal tersebut, antara lain:

- 1) Pasal 25 : Penganekaragaman pangan merupakan upaya meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam dan berbasis pada potensi sumber daya lokal untuk:
 - a. memenuhi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;
 - b. mengembangkan usaha Pangan; dan/atau
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Pasal 26 Ayat 1: Penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dilakukan melalui:
 - a. penetapan kaidah penganekaragaman pangan;
 - b. pengoptimalan pangan lokal;
 - c. dan seterusnya.
- 3) Pasal 27 Ayat 1 : Penetapan kaidah Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada:
 - a. prinsip gizi seimbang;
 - b. berbasis sumber daya dan kearifan lokal;
 - c. ramah lingkungan; dan
 - d. aman.
- 4) Pasal 27 Ayat 2: Prinsip gizi seimbang sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a diukur dengan Pola Pangan Harapan dan/atau ukuran lainnya.
- 5) Pasal 27 Ayat 3: Ketentuan mengenai Pola Pangan Harapan dan/atau ukuran lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah.

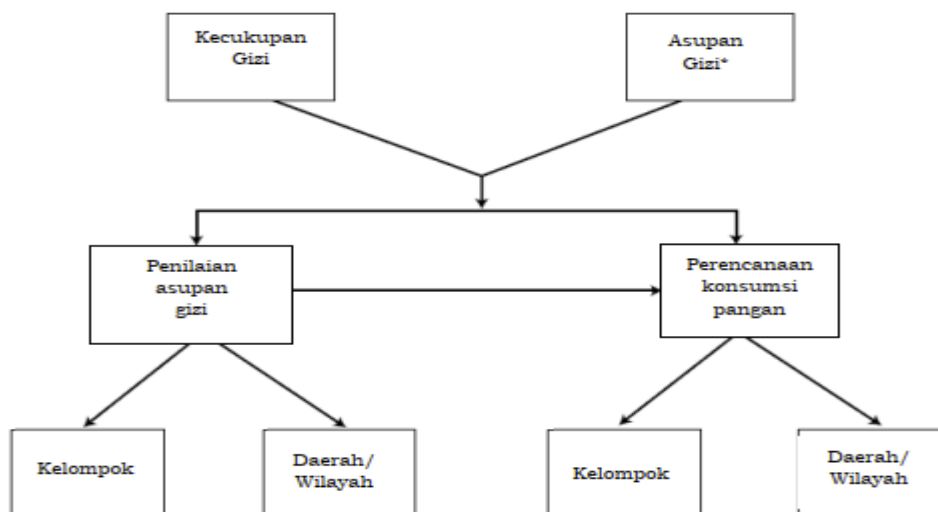
B. Landasan Teoritis dan Metodologis

Upaya perbaikan gizi sangat erat kaitannya dengan pemenuhan kualitas dan kuantitas konsumsi pangan masyarakat. Acuan untuk merencanakan dan menilai pemenuhan konsumsi gizi seseorang disebut kebutuhan gizi (nutrient requirement), sedangkan acuan untuk

merencanakan dan menilai konsumsi pangan kelompok orang atau masyarakat di suatu daerah/wilayah disebut kecukupan gizi (nutrient allowances atau Recommended Dietary Allowances/RDA).

Di Indonesia, *recommended dietary allowances* disebut juga dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG). AKG pertama kali ditetapkan pada tahun 1968, selanjutnya diperbaharui melalui Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG). AKG yang pertama terdiri dari energi, protein, 5 vitamin dan 2 mineral. AKG terbaru di Indonesia berdasarkan ketetapan WNPG tahun 2018 mencakup energi, semua zat gizi makro (protein, lemak dan karbohidrat serta air), 14 vitamin, dan 14 mineral termasuk elektrolit. Pada dasarnya penggunaan AKG dapat dibagi menjadi dua kategori besar yaitu untuk penilaian asupan zat gizi dari konsumsi pangan dan untuk perencanaan konsumsi pangan.

Sejak ditetapkannya AKG dan pembaharuannya secara berkala hingga kini, berbagai kebijakan dan program telah menggunakan AKG, antara lain perencanaan penyediaan pangan, penggunaan AKG untuk penetapan garis kemiskinan, penggunaan AKG untuk penetapan upah minimum, penggunaan AKG untuk penetapan skor Pola Pangan Harapan (PPH), penggunaan AKG untuk penetapan panduan gizi seimbang, dan penggunaan AKG untuk Penetapan Acuan Label Gizi (ALG).



Gambar II.B.1. Penggunaan Angka Kecukupan Gizi untuk Penilaian Asupan Gizi dan Perencanaan Konsumsi Pangan

Pola Pangan harapan atau Desirable Dietary Pattern adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun relatif) dari suatu pola ketersediaan dan/atau konsumsi pangan. FAO-RAPA (1989) mendefinisikan PPH sebagai "komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya". Dengan demikian, PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi baik dalam jumlah, maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Dengan pendekatan PPH ini mutu konsumsi pangan penduduk dapat dilihat dari skor pangan (dietary score) dan dikenal sebagai Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan seimbang gizinya.

Dalam perhitungan skor PPH, pangan dikelompokkan menjadi sembilan, yaitu (1) padi-padian (beras, jagung, terigu dan hasil olahannya); (2) umbi-umbian/pangan berpati (ubi kayu, ubi jalar, kentang, talas, sagu dan hasil olahannya); (3) pangan hewani (ikan, daging, telur, susu, dan hasil olahannya); (4) minyak dan lemak (minyak kelapa, minyak jagung, minyak goreng/kelapa sawit, dan margarin); (5) buah dan biji berminyak (kelapa, kemiri, kenari, mete, coklat); (6) kacang-kacangan (kedele, kacang tanah, kacang hijau, kacang merah, kacang polong, kacang tunggak dan kacang lainnya); (7) gula (gula pasir, gula merah/mangkok dan sirup); (8) sayuran & buah (semua jenis sayuran & buah-buahan) (FAO-RAPA, 1989).

Menurut hasil Workshop on Food and Agriculture Planning for Nutritional Adequacy di Jakarta tanggal 11-13 Oktober 1989, komposisi pangan bagi total wilayah direkomendasikan sebagai berikut : kelompok

padi-padian sekitar 50%, makanan berpati sekitar 5%, pangan hewani 15-20%, minyak dan lemak lebih dari 10%, kacang-kacangan sekitar 5%, gula 6-7%, buah dan sayur 5% (FAO-MOA, 1989).

Tabel II.B.1. Perbandingan Beberapa Standar Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ideal

No.	Kelompok Pangan	FAO-RAPA		Meneg Pangan 1994			Deptan 2001		
		%	Interval	%	Bobot	Skor	%	Bobot	Skor
1.	Padi-padian	40	40 – 60	50	0.5	25	50	0.5	25,0
2.	Umbi-umbian	5	0 – 8	5	0.5	2.5	6	0.5	2.5
3.	Pangan Hewani	20	5 – 20	15	2,0	30.6	12	20,0	24,0
4.	Minyak & lemak	10	5 – 15	10	1,0	10.0	10	0.5	5,0
5.	Buah/biji berminyak	3	0 – 3	3	0.5	1.5	3	0.5	1,0
6.	Kacang-kacangan	6	2 – 10	5	2,0	10.0	5	2,0	10,0
7.	Gula	8	2 – 15	6.7	0.5	3.4	5	0.5	2.5
8.	Sayur dan Buah	5	3 – 8	5	2,0	10.0	6	5,0	30,0
9.	Lain-lain	3	0 – 5	0	0,0	0.0	3	0,0	0,0
		100		100		93.0	100		100

Standar perhitungan skor PPH menurut Deptan (2001) merupakan penyempurnaan dari pola pangan harapan berdasarkan anjuran FAO-RAPA (1989) dengan menerapkan sistim skor untuk penilaian konsumsi pangan berdasarkan Guthrie et al (1981), yaitu setiap kelompok pangan utama (tiga kelompok pangan utama) diberikan skor maksimum yang relatif sama, yaitu 33.3 bagi setiap kelompok pangan utama (berasal dari 100 dibagi 3). Kelompok pangan tersebut adalah (a) pangan sumber karbohidrat dan energi (sereal, umbi-umbian, minyak dan lemak, buah/biji berminyak dan gula) dengan kontribusi energi 74%; (b) pangan sumber protein/lauk-pauk (kacang-kacangan dan pangan hewani) dengan kontribusi energi 17%; (c) pangan sumber vitamin dan mineral (sayur dan buah) dengan kontribusi energi 6% dan (d) pangan lainnya (aneka minuman dan bumbu) dengan kontribusi energi 3%. Rating 0.5 diperoleh dari nilai 33.3 dibagi 74; rating 2.0 diperoleh dari nilai 33.3 dibagi 17; dan rating 5.0 diperoleh dari nilai 33.3 dibagi 6. Masing-masing hasil

dibulatkan untuk kembali mendapatkan total skor PPH = 100. Tabel II.B.2 menyajikan Standar Perhitungan Skor PPH Ideal Nasional dan Estimasi Berat Konsumsi Pangan.

Tabel II.B.2. Susunan PPH Ideal dan Estimasi Berat Konsumsi Pangan Berdasarkan Standar Ideal Nasional

No.	Kelompok Pangan	Kecukupan Energi Per Kapita		Standar Perhitungan PPH		Estimasi Berat (gr/kap/hari)
		kkal/hari	%AKE	Bobot	Skor	
1.	Padi-padian	1050	50	0.5	25,0	289
2.	Umbi-umbian	126	6	0.5	2.5	95
3.	Pangan Hewani	252	12	2,0	24,0	147
4.	Minyak & lemak	210	10	0.5	5,0	26
5.	Buah/biji berminyak	63	3	0.5	1,0	11
6.	Kacang-kacangan	105	5	2,0	10,0	37
7.	Gula	105	5	0.5	2.5	32
8.	Sayur dan Buah	126	6	5,0	30,0	242
9.	Lain-lain	63	3	0,0	0,0	16
		2100	100		100,0	

Penyempurnaan Standar Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ideal di Indonesia yang disajikan pada Tabel II.B.2. mengacu pada rumusan Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian tahun 2015 sebagaimana disajikan pada Tabel II.B.1. Beberapa pertimbangan pokok yang digunakan dalam perumusan, antara lain: (1) Angka Kecukupan Energi (AKE) berdasarkan Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) Tahun 1998 sebesar 2000 kkal/kapita/hari atau WNPG Tahun 2012 sebesar 2150 kkal/kapita/hari atau WNPG Tahun 2018 sebesar 2100 kkal/kapita/hari; (2) Perubahan AKE sebaiknya menunggu berakhirnya periode RPJM berjalan dan digunakan saat menetapkan sasaran kinerja periode RPJM berikutnya; (3) Persentase energi untuk perhitungan skor PPH dihitung terhadap AKE; (4) Bobot disempurnakan sesuai teori rating; (5) Skor maksimum PPH adalah 100; (6) Peran pangan hewani, gula, serta sayur dan buah disesuaikan dengan PUGS; (7) Peran umbi-umbian ditingkatkan sejalan dengan kebijakan diversifikasi pangan pokok dan

pengembangan pangan lokal; (8) Peran makanan lainnya terutama bumbu dan minuman lainnya tidak diabaikan; (9) Untuk Beberapa daerah yang memiliki karakteristik dan potensi wilayah serta preferensi pangan masyarakat yang dianggap spesifik diperlukan penyesuaian.

Standar PPH berguna sebagai instrumen sederhana untuk menilai situasi situasi konsumsi pangan, berupa jumlah dan komposisi pangan menurut kelompok pangan. PPH juga berguna untuk perencanaan konsumsi maupun ketersediaan pangan. Dengan pendekatan PPH, perencanaan konsumsi dan ketersediaan pangan penduduk di masa mendatang diharapkan dapat mencapai ideal, yaitu tidak hanya memenuhi kecukupan gizi (nutritional adequacy) akan tetapi sekaligus juga mempertimbangkan keseimbangan gizi (nutritional balance) yang didukung oleh cita rasa (palatability), daya cerna (digestability), daya terima masyarakat (acceptability), kuantitas dan kemampuan daya beli (affordability).

C. Definisi Atau Batasan Istilah

Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan & kesehatan manusia.

Angka Kecukupan Energi adalah rata-rata jumlah energi yang diperlukan oleh setiap orang dalam suatu populasi di suatu wilayah untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif.

Angka Kecukupan Protein adalah rata-rata jumlah protein yang diperlukan oleh setiap orang dalam suatu populasi di suatu wilayah untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif.

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun relatif) dari suatu pola ketersediaan dan/atau konsumsi pangan.

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.

Pangan Strategis yang dimaksud dalam analisis ini adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat serta banyak dikonsumsi oleh penduduk dibandingkan dengan jenis pangan lainnya.

Konsumsi Pangan Aktual adalah jumlah dan jenis pangan yang biasanya dikonsumsi penduduk dalam satuan gram/kapita/hari atau kg/kapita/tahun.

Konsumsi Pangan Ideal adalah jumlah dan jenis pangan yang semestinya dikonsumsi penduduk dalam satuan gram/kapita/hari atau kg/kapita/tahun yang mengacu pada pemenuhan kecukupan gizi berdasarkan Pola Pangan Harapan.

Kebutuhan Konsumsi Pangan adalah jumlah dan jenis pangan yang semestinya tersedia untuk dikonsumsi penduduk dalam satuan gram/kapita/hari atau kg/kapita/tahun yang mengacu pada pemenuhan kecukupan gizi berdasarkan Pola Pangan Harapan.

III. METODE ANALISIS

A. Desain dan Waktu Analisis

Kegiatan Analisis Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Penduduk Kabupaten Bogor , menggunakan desain *explorative study* dengan menggali informasi untuk merumuskan karakteristik khas dari subjek yang dikaji secara deskriptif. Pendekatan *retrospective study* digunakan untuk mengkaji kecenderungan tertentu berdasarkan data & dan informasi yang ada. Selain itu digunakan pula pendekatan *prospective study* untuk mengestimasi kebutuhan konsumsi pangan ideal. Adapun lingkup kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan desain analisis yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

1. Inventarisasi bahan pustaka terkait dengan peraturan dan perundang-undangan, kebijakan dan strategi serta publikasi ilmiah yang berkaitan dengan pembangunan ketahanan pangan yang bersumber dari instansi pemerintah atau lembaga-lembaga terkait lainnya.
2. Inventarisasi data-data sekunder yang digunakan dalam analisis, khususnya data-data yang terkait dengan karakteristik sosial ekonomi, demografi, dan agroekologi serta konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Bogor yang bersumber dari publikasi dan/atau laporan statistik instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor atau lembaga-lembaga terkait lainnya.
3. Pengolahan dan analisis data, yang mencakup perhitungan rata-rata kuantitas konsumsi pangan, kecukupan energi dan protein, skor Pola Pangan Harapan, serta estimasi kebutuhan konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Bogor.
4. Penyusunan laporan hasil analisis, yang secara garis besar mencakup bagian pendahuluan, tinjauan pustaka, metode analisis, keadaan umum wilayah, analisis situasi konsumsi pangan, analisis dan estimasi kebutuhan konsumsi pangan, serta kesimpulan dan saran.

B. Sumber dan Jenis Data Analisis

Sumber data pokok yang digunakan dalam Analisis Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Penduduk Kabupaten Bogor ini didasarkan pada data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kabupaten Bogor Tahun 2021 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Data pokok yang digunakan dalam analisis adalah data konsumsi pangan penduduk yang disajikan dalam bentuk tabel rata-rata konsumsi pangan per komoditas dalam satuan URT per kapita/minggu. Adapun jenis dan sumber data pokok yang digunakan dalam Analisis Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Penduduk Kabupaten Bogor disajikan dalam Tabel II.B.1.

Tabel III.B.1. Jenis dan Sumber Data Pokok Analisis Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Penduduk Kabupaten Bogor

No	Jenis Data	Parameter Pokok	Tahun Data	Sumber Data	
				Publikasi	Intansi
1	Konsumsi Pangan Penduduk	Rata-rata kuantitas konsumsi pangan penduduk per komoditas dalam satuan URT per kapita/minggu	2021	Data Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2021	Badan Pusat Statistik Badan Pangan Nasional
2	Karakteristik Geografi dan Demografi Wilayah	Luas Wilayah Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk	2021	Kabupaten Bogor Dalam Angka Tahun 2023	Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor
3	Karakteristik Ekonomi Wilayah	Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Per Kapita dan lain-lain	2021	Statistik Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023	Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor

C. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dilakukan secara sistematis dan metodologis dalam rangka mempersiapkan data agar dapat dikaji dan

digunakan sesuai tujuan pokok kajian. Tahap pertama yang dilakukan setelah semua data terkumpul dan semua instrumen terisi dengan baik adalah rekapitulasi. Tahapan pengolahan data yang tidak kalah pentingnya adalah editing data. Editing data merupakan suatu proses pengelolaan data dalam rangka mempersiapkan data sebelum data dientri dan dianalisis lebih lanjut, yang meliputi : pengecekan ulang dan penyesuaian unit atau satuan data. Editing data bertujuan untuk menghindari adanya kekeliruan data yang diakibatkan oleh kesalahan pencatatan dan perbedaan unit atau satuan data.

Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan alat bantu yang sistematis dan praktis dalam bentuk Aplikasi Komputer Harmonisasi Analisis Pola Pangan Harapan Berdasarkan Data Susenas Tahun 2021 yang dikembangkan atas kerjasama Badan Ketahanan Pangan (BKP), Kementerian Pertanian dengan Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor. Aplikasi tersebut disusun dalam bentuk Spreadsheet Microsoft Excel for Windows. Agar hasil analisis menjadi lebih akurat serta memiliki kekuatan analisis dan taraf signifikansi yang baik, maka telah dilakukan cleaning terhadap data hasil entri pada aplikasi komputer. Cleaning data adalah suatu proses check and recheck terhadap nilai-nilai data pada data hasil entri data sebelum dilakukan proses analisis terhadap data.

Secara umum analisis dilakukan terhadap berbagai data sekunder yang berhasil dikumpulkan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan analisis kuantitatif digunakan untuk menyajikan dan menganalisa keragaan statistik berbagai jenis indikator situasi ketahanan pangan, khususnya situasi konsumsi pangan penduduk. Parameter statistik banyak digunakan adalah rata-rata dan persentasi. Untuk memudahkan pembahasan hasil analisis sebagian besar data disajikan dalam bentuk tabel ringkasan.

Terkait dengan analisis situasi konsumsi pangan penduduk berdasarkan pendekatan Pola Pangan Harapan (PPH) dengan menggunakan data Susenas, secara metodologis terdapat dua hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu : 1) Metode "recall" seminggu berpotensi terjadinya under/over estimate data konsumsi pangan yang diingat oleh responden; dan 2) Keterbatasan jenis makanan jadi dan makanan yang dikonsumsi di luar rumah yang terdapat dalam kuesioner Susenas. Kondisi tersebut dapat menyebabkan penilaian konsumsi pangan menjadi kurang menggambarkan kondisi konsumsi pangan penduduk yang sesungguhnya. Oleh karena itu, diperlukan justifikasi agar data konsumsi pangan penduduk berdasarkan data Susenas lebih mendekati kondisi riil.

Indikator utama situasi konsumsi pangan yang dianalisis mencakup aspek kuantitas dan kualitas. Aspek kuantitas yang dianalisis berdasarkan mencakup total dan/atau rata-rata konsumsi pangan menurut jenis dan kelompok pangan, tingkat kecukupan energi dan protein, serta pencapaian skor Pola Pangan Harapan konsumsi pangan. Tingkat kecukupan energi (TKE) dan protein (TKP) serta skor Pola Pangan Harapan (PPH). Perhitungan dan analisis TKE, TKP dan skor PPH tahun 2021 didasarkan pada AKE sebesar 2100 kkal/kapita/hari energi dan AKP sebesar 57 gram/kapita/hari protein serta standar PPH Ideal Nasional.

Untuk menganalisis kualitas konsumsi pangan digunakan pendekatan Pola Pangan Harapan (PPH) dengan skor maksimal 100 yang mengacu pada standar PPH Nasional yang ditetapkan oleh Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian, dengan kontribusi energi terhadap Angka Kecukupan Energi (AKE) yang ideal untuk masing-masing kelompok pangan adalah sebagai berikut : 50% padi-padian, 6 % umbi-umbian, 12 % pangan hewani, 10 % minyak dan lemak, 3 % buah/biji berminyak, 5 % kacang-kacangan, 5 % gula, 6 % sayur dan buah, dan 3 % lain-lain. Adapun langkah menghitung skor PPH konsumsi pangan penduduk adalah sebagai berikut:

- 1) Menghitung nilai jumlah energi yang diperoleh dari setiap jenis pangan yang dikonsumsi
- 2) Mengelompokkan pangan kedalam 9 kelompok pangan dengan pendekatan Pola Pangan Harapan
- 3) Menghitung nilai total dan sub total energi masing-masing kelompok pangan
- 4) Menghitung kontribusi energi berdasarkan dalam persentase masing-masing kelompok pangan terhadap Angka Kecukupan Energi (AKE) yang dianjurkan.
- 5) Mengalikan kontribusi energi dengan bobot masing-masing kelompok pangan sesuai dengan standar perhitungan PPH Ideal Nasional, sehingga diperoleh skor untuk setiap kelompok pangan.
- 6) Apabila nilai hasil perhitungan melebihi nilai ideal maka digunakan nilai ideal, dan apabila nilai hasil perhitungan kurang dari nilai ideal maka digunakan nilai hasil perhitungan sebagai skor.
- 7) Menjumlahkan skor semua kelompok pangan sehingga diketahui skor PPH konsumsi pangan.

Berdasarkan kontribusi energi sesuai standar perhitungan skor PPH Ideal dan AKE nasional sebesar 2100 kkal/kapita/hari maka kontribusi energi konsumsi pangan yang ideal untuk masing-masing kelompok pangan adalah sebagai berikut : padi-padian (1050 kkal), umbi-umbian (126 kkal), pangan hewani (252 kkal), minyak dan lemak (210 kkal), buah/biji berminyak (63 kkal), kacang-kacangan (105 kkal), gula (105 kkal), sayur dan buah (126 kkal), dan pangan lainnya (63 kkal).

Dengan mengkonversi kontribusi energi tersebut kedalam berat jenis pangan acuan masing-masing kelompok pangan, maka rata-rata berat pangan yang ideal untuk masing-masing kelompok pangan adalah setara dengan sekitar : 289 gram padi-padian, 95 gram umbi-umbian, 147 gram pangan hewani, 26 gram minyak dan lemak, 11 gram buah/biji berminyak, 37 gram kacang-kacangan, 32 gram gula, 242 gram sayur dan

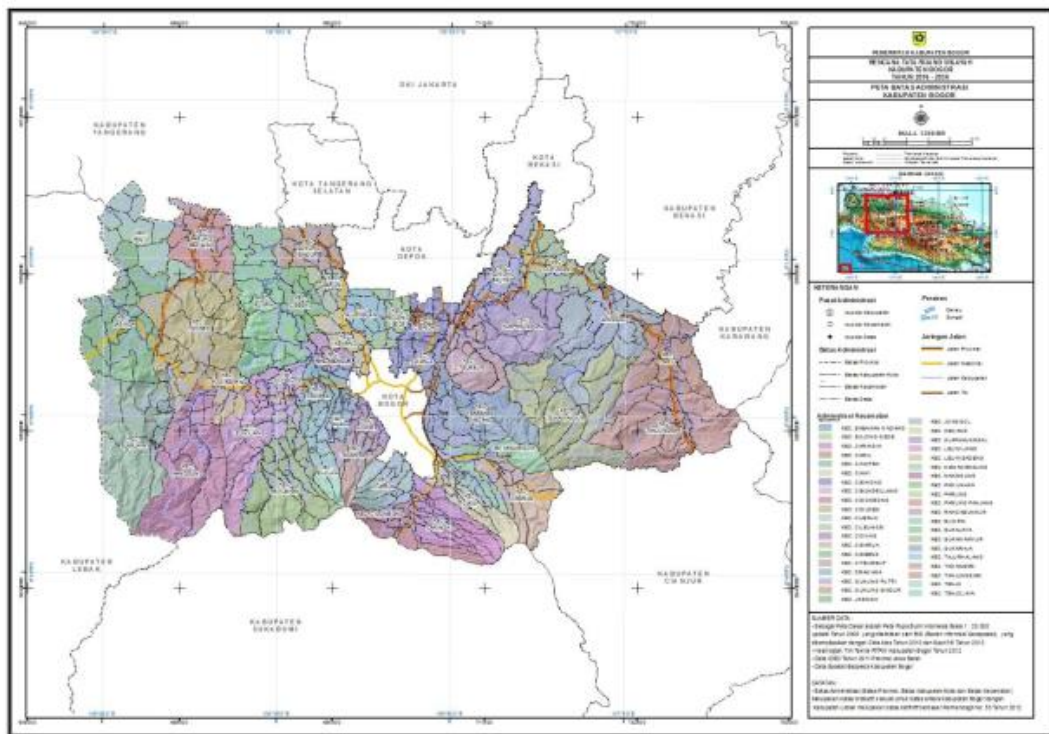
buah, dan 16 gram pangan lainnya. Adapun jenis pangan acuan masing-masing kelompok pangan yang digunakan adalah sebagai berikut : padi-padian (beras giling), umbi-umbian (ubi kayu), pangan hewani (daging sapi), minyak dan lemak (minyak kelapa sawit), buah/biji berminyak (kelapa tua daging), kacang-kacangan (kacang tanah), gula (gula pasir), sayur dan buah (bayam), dan lain-lain (merica).

Estimasi kebutuhan konsumsi pangan ideal per jenis pangan didasarkan pada persen energi suatu jenis pangan pada kelompok pangan masing-masing dikalikan jumlah energi ideal tiap kelompok dengan asumsi kontribusi antar jenis pangan tidak berubah. Estimasi berat pangan ideal untuk suatu jenis pangan diperoleh dari hasil konversi jumlah energi ideal tiap jenis pangan kedalam berat pangan. Jumlah kebutuhan konsumsi pangan penduduk tersebut didasarkan pada angka rata-rata konsumsi pangan ditambah 10%. Estimasi kebutuhan konsumsi pangan wilayah tahun tertentu dihitung berdasarkan perkalian rata-rata kebutuhan konsumsi pangan (kg/kapita/tahun) dengan jumlah penduduk tahun yang sama. Hasil estimasi kebutuhan pangan wilayah untuk mencapai sasaran skor PPH pada periode waktu tertentu dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk menentukan strategi pemenuhan kebutuhan pangan wilayah. Selain informasi tentang kelompok jenis pangan apa saja yang masih perlu ditingkatkan, hasil analisis tersebut juga dapat menjadi acuan estimasi tingkat pertumbuhan yang diperlukan agar target tersebut dapat dicapai.

IV. KEADAAN UMUM WILAYAH KABUPATEN BOGOR

A. Geografi dan Agroekologi

Kabupaten Bogor merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang berada pada ketinggian 15 – 2000 M di atas permukaan laut yang sebagian di apit oleh gunung – gunung dan bukit serta memiliki 6 daerah aliran sungai. Secara administratif, Kabupaten Bogor mempunyai luas 266.383 Ha yang terdiri dari 40 kecamatan dan 435 Desa/ Kelurahan. Secara astronomis, Kabupaten Bogor terletak pada posisi 6°19' Lintang Utara dan 6°47' Lintang Selatan, serta 106°01' dan 107°103' Bujur Timur.



Gambar IV.A.1. Peta Wilayah Administratif Kabupaten Bogor (Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023)

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Bogor memiliki batas-batas: Utara – Kabupaten Bogor; Selatan – Kabupaten Sukabumi; Barat – Kabupaten Lebak, Provinsi Banten; Timur – Kabupaten Purwakarta; Timur Laut – Kabupaten Bogor; Tenggara – Kabupaten Cianjur dan Tengah –

Kota Bogor. Secara topografi, Kabupaten Bogor memiliki tipe morfologi wilayah yang bervariasi, dari dataran yang relatif rendah di bagian utara hingga dataran tinggi di bagian selatan, yaitu sekitar 29,28% berada pada ketinggian 15-100 meter di atas permukaan laut (dpl), 42,62% berada pada ketinggian 100-500 meter dpl, 19,53% berada pada ketinggian 500–1.000 meter dpl, 8,43% berada pada ketinggian 1.000–2.000 meter dpl dan 0,22% berada pada ketinggian 2.000–2.500 meter dpl.

Kondisi morfologi Kabupaten Bogor sebagian besar berupa dataran tinggi, perbukitan dan pegunungan dengan batuan penyusunnya didominasi oleh hasil letusan gunung, yang terdiri dari andesit, tufa dan basalt. Gabungan batu tersebut termasuk dalam sifat jenis batuan relatif lulus air dimana kemampuannya meresapkan air hujan tergolong besar. Jenis pelapukan batuan ini relatif rawan terhadap gerakan tanah bila mendapatkan siraman curah hujan yang tinggi. Selanjutnya, jenis tanah penutup didominasi oleh material vulkanik lepas agak peka dan sangat peka terhadap erosi, antara lain Latosol, Aluvial, Regosol, Podsolik dan Andosol. Oleh karena itu, beberapa wilayah rawan terhadap tanah longsor.

Wilayah Kabupaten Bogor berada pada ketinggian lereng yang bervariasi antara 0-8% hingga >40%. Secara keseluruhan, kelas kemiringan 0-8% merupakan yang terluas di Kabupaten Bogor yakni 130.320,76 Ha dan yang terkecil pada kelas kemiringan lereng >40% yakni seluas 9.800,52 Ha.

Secara klimatologis, wilayah Kabupaten Bogor termasuk iklim tropis sangat basah di bagian selatan dan iklim tropis basah di bagian utara, dengan rata-rata curah hujan tahunan 2.500–5.000 mm/tahun, kecuali di wilayah bagian utara dan sebagian kecil wilayah timur curah hujan kurang dari 2.500 mm/tahun. Suhu rata-rata di wilayah Kabupaten Bogor adalah 20°- 30°C, dengan rata-rata tahunan sebesar 25°C. Kelembaban udara 70% dan kecepatan angin cukup rendah, dengan rata-rata 1,2 m/detik

dengan evaporasi di daerah terbuka rata-rata sebesar 146,2 mm/bulan. Sedangkan secara hidrologis, wilayah Kabupaten Bogor terbagi ke dalam 9 Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu: (1) DAS Cidurian; (2) DAS Cimanceuri; (3) DAS Cisadane; (4) DAS Ciliwung; (5) DAS Cileungsi; (6) DAS Cikarang; (7) DAS Cibeet; (8) DAS Ciberang; (9) DAS Ciberureum.

Kondisi geologi Kabupaten Bogor terdiri dari jenis batuan batu gamping, batuan intrusi, batuan tersier, endapan permukaan, gunung api muda dan gunung api tua. Jenis batuan gunung api muda merupakan yang terluas di Kabupaten Bogor. Selanjutnya, jenis tanah penutup didominasi oleh material vulkanik lepas agak peka dan sangat peka terhadap erosi, antara lain Latosol, Aluvial, Regosol, Podsolik dan Andosol. Oleh karena itu, beberapa wilayah rawan terhadap tanah longsor. Jenis tanah di Kabupaten Bogor terdapat 16 jenis yang tersebar di seluruh wilayah. Asosiasi Latosol merah dan latosol coklat kemerahan dengan luas 74.488,47 Ha mendominasi jenis tanah di bagian utara.

Kabupaten Bogor memiliki sumberdaya alam yang cukup besar. Salah satu potensi perlu dikembangkan adalah pertanian dengan luas lahan 39.000 Ha atau 13,06 % dari luas Kabupaten Bogor. Selain potensi produksi tanaman pangan tanaman, produksi tanaman perkebunan dan produksi perikanan air tawar dapat dilihat dari luasan sawah produktif, perkebunan dan kawasan perikanan. Pemerintah Kabupaten Bogor sangat memperhatikan pengembangan pertanian dan pembangunan perdesaan pada khususnya melalui kebijakan Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Perdesaan (RP3) yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2009 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang Revitalisasi Pertanian.

Selain meningkatkan produksi tujuan pengembangan pertanian dan pembangunan perdesaan juga diarahkan agar dilakukan secara efektif dan efisien serta mempunyai daya jual yang tinggi atau mempunyai daya saing

yang tinggi sesuai amanat Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2010 tentang Peningkatan Daya Saing Produk Kabupaten Bogor. Periode tahun 2018 – 2023 ke depan setiap kecamatan didorong untuk mengembangkan satu komoditi unggulan primer (pertanian, peternakan dan perikanan), satu komoditi unggulan sekunder (UKM pengolahan) dan satu komoditi unggulan tersier (jasa pariwisata).

Pada tahun 2020 produksi padi terealisasi sebesar 477.255 ton GKG dari target sebesar 418.884 ton GKG dengan tingkat capaian kinerja sebesar 113,93%. Adapun faktor penyebab penurunan tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap tahun 2019 yaitu berkurangnya luas areal tanam padi di tahun 2020. Pada tahun 2020 produktivitas padi sawah terealisasi sebesar 62,53 Ku/Ha dari target sebesar 55,78 Ku/Ha dengan tingkat capaian kinerja sebesar 112,10%. Adapun faktor penyebab penurunan tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap tahun 2019 yaitu berkurangnya hasil produksi padi di tahun 2020 akibat adanya alih fungsi lahan. Pada tahun 2020 produktivitas padi gogo terealisasi sebesar 34,36 Ku/Ha dari target sebesar 33,64 Ku/Ha dengan tingkat capaian kinerja sebesar 102,14%. Terdapat peningkatan tingkat capaian kinerja jika dibandingkan antara tahun 2019 dengan tahun 2020, hal ini disebabkan oleh adanya penggunaan teknologi budidaya yang efektif pada tahun 2020.

Pada tahun 2020 produksi palawija terealisasi sebesar 144.424 ton dari target sebesar 151.867 ton dengan tingkat capaian kinerja sebesar 95,10%. Secara umum tidak tercapainya target produksi palawija pada tahun 2020 selain dikarenakan oleh adanya penurunan luas panen maupun tingkat produktivitas, hal ini juga didorong oleh sebagian besar petani yang menanam palawija seperti kedelai, jagung atau tanaman lainnya masih sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah baik dari pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah. Faktor-faktor tersebut mendorong terjadinya penurunan tingkat capaian kinerja tahun 2020

terhadap tahun 2019. Pada tahun 2020 produktivitas palawija terealisasi sebesar 172,91 Ku/Ha dari target sebesar 171,92 Ku/Ha dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,58%. Terdapat peningkatan tingkat capaian kinerja jika dibandingkan antara tahun 2019 dengan tahun 2020, hal ini disebabkan oleh adanya penggunaan teknologi budidaya yang efektif pada tahun 2020 meskipun belum dapat menahan laju alih fungsi lahan yang berpengaruh terhadap hasil produksi padi.

Pada tahun 2020 produksi sayuran terealisasi sebesar 112.493 ton dari target sebesar 92.950 ton dengan tingkat capaian kinerja sebesar 121,03%. Adapun faktor penyebab penurunan tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap tahun 2019 yaitu berkurangnya luas areal tanam sayuran di tahun 2020. Pada tahun 2020 produktivitas sayuran terealisasi sebesar 128,32 Ku/Ha dari target sebesar 116,17 Ku/Ha dengan tingkat capaian kinerja sebesar 110,46%. Adapun faktor penyebab penurunan tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap tahun 2019 yaitu berkurangnya luas areal tanam sayuran di tahun 2020.

Pada tahun 2020 produksi buah-buahan terealisasi sebesar 106.555 ton dari target sebesar 60.572 ton dengan tingkat capaian kinerja sebesar 175,91%. Namun terdapat penurunan tingkat capaian kinerja jika dibandingkan antara tahun 2019 dengan tahun 2020, hal ini disebabkan oleh berkurangnya luas areal tanam buah-buahan di tahun 2020.

Pada tahun 2020 Kabupaten Bogor juga mengalami pandemi covid 19 sehingga sangat berpengaruh terhadap pembangunan perikanan dan peternakan yang mengakibatkan ada beberapa indikator yang tidak mencapai target, walaupun secara rata-rata capaian melebihi 100 % dikarenakan adanya pencapaian realisasi produksi telur mencapai 302,41 %. Hal ini dikarenakan adanya perubahan metoda perhitungan yang ditetapkan oleh Provinsi Jawa Barat. Disamping produksi telur yang melebihi target, dari sektor peternakan yang melebihi target pencapaian adalah produksi susu yang mencapai 106,03 %. Untuk produksi ikan hias

juga melebihi target yang telah ditetapkan dengan capaian sebesar 108,71 %. Hal ini disebabkan banyaknya petani ikan yang sebelumnya melakukan budidaya ikan konsumsi beralih ke ikan hias di masa pandemi ini karena banyaknya permintaan ikan hias.

Sementara ada beberapa indikator yang tidak mencapai target di tahun 2020 ini baik di sektor perikanan maupun peternakan. Untuk produksi ikan konsumsi hanya tercapai 94,35 % dari target yang telah ditetapkan. Demikian juga produksi benih ikan hanya tercapai 92,91 %. Hal ini disebabkan di masa pandemi covid 19 ini banyak pembudidaya yang menghentikan sementara kegiatan budidayanya dikarenakan berkurangnya permintaan ikan konsumsi baik benih maupun ikan konsumsi itu sendiri. Sedangkan produksi olahan produk perikanan hanya tercapai realisasi sebesar 69,24 % dari target. Hal ini dikarenakan turunnya permintaan dan daya beli masyarakat akan produk olahan perikanan, begitu juga dengan ekspor produk olahan perikanan di tahun 2020 ini mengalami penurunan.

Untuk produksi daging di tahun 2020 ini juga tidak mencapai target yaitu hanya tercapai sebesar 97,95 %. Hal ini disebabkan turunnya permintaan masyarakat dan berkurangnya jumlah pemotongan hewan qurban. Disamping itu juga di tahun 2020 ini banyak hotel dan restoran yang mengurangi bahkan menghentikan kegiatannya dikarenakan adanya kebijakan PSBB dari pemerintah terkait merebaknya wabah virus corona di Indonesia, yang mengakibatkan berkurangnya permintaan pemenuhan daging dari restoran dan hotel.

B. Demografi dan Ekonomi

Penduduk Kabupaten Bogor berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2020 sebanyak 5.427.068 jiwa yang terdiri atas 2.789.738 jiwa penduduk laki-laki dan 2.637.330 jiwa penduduk perempuan. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2019 penduduk Bogor mengalami

pertumbuhan sebesar 1.29 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2020 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 105.78. Kepadatan penduduk di Kabupaten Bogor tahun 2020 mencapai 1.187 jiwa/km² dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Bojonggede dengan kepadatan sebesar 10.145 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Cariu sebesar 303 jiwa/km².

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2010 di Kabupaten Bogor sampai dengan tahun 2020 mencapai Rp. 154,09 triliun atau mengalami penurunan sebesar 1,77 persen dari tahun sebelumnya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku di Kabupaten Bogor pada tahun 2020 mencapai Rp. 237,20 triliun atau mengalami penurunan sebesar 0,44 persen dari tahun sebelumnya.

Secara umum kontribusi sektor dalam PDRB berdasarkan harga konstan relatif tetap atau tidak berubah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Beberapa sektor yang tumbuh sepanjang tahun adalah sektor konstruksi, Sektor Transportasi dan Pergudangan, Sektor Informasi dan Komunikasi, serta Sektor Jasa lainnya. Sementara itu sektor yang relatif turun sepanjang tahun adalah sektor Pertambangan dan Penggalan serta sektor Industri Pengolahan, sektor Pengadaan Listrik dan Gas. Kontribusi tertinggi terhadap PDRB Kabupaten Bogor atas dasar harga konstan tahun 2010 untuk tahun 2020 adalah sektor industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 53,67 persen, sedangkan yang terkecil kontribusi sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang.

Kabupaten Bogor memiliki potensi pertanian yang cukup besar, hal ini dapat dilihat dari persentase kontribusi sektor pertanian terhadap capaian PDRB Kabupaten Bogor. Persentase kontribusi sektor pertanian peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bogor berdasarkan harga konstan tahun 2010 pada untuk tahun 2020 mencapai 5,39 persen. Persentase kontribusi sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap PDRB Kabupaten

Bogor pada tahun 2020 berdasarkan harga konstan tahun 2010 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan kontribusi pada tahun sebelumnya.

V. ANALISIS SITUASI KONSUMSI PANGAN PENDUDUK

A. Pola Konsumsi Pangan Penduduk

Konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Bogor berdasarkan data Susenas Tahun 2021 menunjukkan bahwa secara kuantitas konsumsi pangan penduduk sudah cukup tinggi. Sebagaimana disajikan pada Tabel V.A.1 kelompok pangan yang dikonsumsi dalam jumlah yang relatif banyak dalam satuan berat secara berturut-turut adalah kelompok padi-padian, pangan hewani, serta sayur & buah. Sementara itu, kelompok pangan umbi-umbian, minyak dan lemak, kacang-kacangan, dan gula dikonsumsi dalam jumlah yang relatif sedikit. Buah/biji berminyak merupakan kelompok pangan yang dikonsumsi dalam jumlah yang paling sedikit.

Tabel V.A.1. Situasi Pola Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2021.

No	Kelompok Pangan	Kontribusi Kelompok		Kontribusi Pangan Strategis	
		gram/hari	kg/tahun	Jenis Pangan	kg/tahun
1.	Padi-padian	311,1	113,6	Beras	94,1
2.	Umbi-umbian	48,6	17,7	Singkong	10,6
3.	Pangan Hewani	102,8	37,5	Telur	8,4
4.	Minyak dan Lemak	32,7	12,0	Minyak Sawit	9,4
5.	Buah/Biji Berminyak	1,4	0,5	Kemiri	0,3
6.	Kacang-kacangan	25,8	9,4	Kacang Kedelai	8,7
7.	Gula	12,7	4,6	Gula Pasir	4,2
8.	Sayur dan Buah	207,1	75,6	Sayur	49,4
9.	Lain-lain	77,7	28,4	Minuman	25,5

Keterangan: *) Data diolah berdasarkan data Susenas Tahun 2021

Data yang lebih terperinci tentang rata-rata konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Bogor pada tahun 2021 dalam satuan berat per kelompok dan jenis pangan dapat dilihat pada Lampiran 1. Data yang disajikan pada lampiran tersebut sebagaimana diringkas pada Tabel V.A.1 menunjukkan bahwa berdasarkan jumlahnya dalam satuan berat, jenis-jenis pangan yang paling banyak dikonsumsi oleh penduduk di Kabupaten Bogor pada tahun 2021 berturut-turut untuk masing-masing kelompok pangan adalah beras (94,4 kg/kapita/tahun) pada kelompok padi-padian, singkong (10,6 kg/kapita/tahun) untuk kelompok umbi-umbian, telur (8,4 kg/kapita/tahun) untuk kelompok pangan hewani, minyak sawit (9,9 kg/kapita/tahun) untuk kelompok minyak dan lemak, kemiri (0,3 kg/kapita/tahun) untuk kelompok buah/biji berminyak, kacang kedelai (8,7 kg/kapita/tahun) untuk kelompok kacang-kacangan, gula pasir (4,2 kg/kapita/tahun) untuk kelompok gula, sayur (49,4 kg/kapita/tahun) untuk kelompok sayur dan buah, dan minuman (25,5 kg/kapita/tahun) untuk kelompok lain-lain.

B. Konsumsi dan Kecukupan Gizi

Ukuran jumlah dalam satuan berat pangan yang dikonsumsi penduduk di Wilayah Kabupaten Bogor sebagaimana dibahas pada sub-bab sebelumnya belum dapat menggambarkan besarnya capaian kontribusi pangan sebagai sumber zat gizi, sehingga tidak dapat menjadi ukuran untuk menganalisis capaian kuantitas maupun kualitas konsumsi pangan penduduk. Oleh itu perlu dianalisis lebih jauh capaian kontribusi gizi, masing-masing kelompok maupun jenis pangan.

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel V.B.1 terlihat bahwa kontribusi energi konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2021 paling banyak diperoleh dari kelompok padi-padian, yaitu sekitar 1.295 kkal/kapita/hari (60,9 %). Kelompok pangan lainnya yang memberikan kontribusi energi yang signifikan adalah minyak dan lemak sekitar 292 kkal/kapita/hari (13,7 %) dan pangan hewani sekitar 228

kkal/kapita/hari (10,7 %). Sementara kelompok umbi-umbian, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah serta lain-lain kontribusi energinya relatif kecil.

Tabel V.B.1. Kontribusi Energi Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2021.

No	Kelompok Pangan	Kontribusi Kelompok		Kontribusi Pangan Strategis	
		kkal/kap/hari	%	Jenis Pangan	kkal/kap/hari
1.	Padi-padian	1.295	60,9	Beras	922,1
2.	Umbi-umbian	55	2,6	Singkong	36,0
3.	Pangan Hewani	228	10,7	Daging unggas	80,4
4.	Minyak dan Lemak	292	13,7	Minyak Lainnya	233,5
5.	Buah/Biji Berminyak	8	0,4	Kemiri	5,1
6.	Kacang-kacangan	52	2,4	Kacang Kedelai	45,6
7.	Gula	48	2,2	Gula Pasir	43,3
8.	Sayur dan Buah	89	4,2	Sayur	50,0
9.	Lain-lain	60	2,8	Minuman	54,7
Total		2.128	100,0		

Keterangan: *) Data diolah berdasarkan data Susenas Tahun 2021

Data yang disajikan pada Tabel V.B.1 lebih jauh menunjukkan bahwa secara umum hampir sejalan dengan pola konsumsi pangannya, jenis-jenis pangan yang paling banyak menyumbang energi pada konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Bogor pada tahun 2021 untuk masing-masing kelompok pangan adalah beras (922,1 kkal/kapita/hari) pada kelompok padi-padian, singkong (36,0 kkal/kapita/hari) pada kelompok umbi-umbian, daging unggas (80,4 kkal/kapita/hari) untuk kelompok pangan hewani, minyak lainnya (233,5 kkal/kapita/hari) untuk kelompok minyak dan lemak, kemiri (5,1 kkal/kapita/hari) untuk kelompok buah/biji berminyak, kacang kedelai (45,6 kkal/kapita/hari) untuk kelompok kacang-kacangan, gula pasir (43,3 kkal/kapita/hari) untuk kelompok gula, buah (50,0 kkal/kapita/hari) untuk kelompok sayur dan buah, dan minuman (54,7 kkal/kapita/hari) untuk kelompok lain-lain. Data yang lebih

terperinci tentang rata-rata kontribusi energi konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Bogor pada tahun 2021 per kelompok dan jenis pangan dapat dilihat pada Lampiran 2.

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel V.B.2 terlihat bahwa kontribusi protein konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2021 paling banyak diperoleh dari kelompok padi-padian, yaitu sekitar 30,1 gram/kapita/hari (51,0 %). Kelompok pangan lainnya yang memberikan kontribusi Protein yang signifikan adalah pangan hewani sekitar 18,8 gram/kapita/hari (31,9 %) dan kacang-kacangan sekitar 5,3 gram/kapita/hari (9,0 %). Sementara kelompok umbi-umbian, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, gula, sayur dan buah serta lain-lain kontribusi Proteinnya relatif kecil.

Tabel V.B.2. Kontribusi Protein Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2021.

No	Kelompok Pangan	Kontribusi Kelompok		Kontribusi Pangan Strategis	
		gram/kap/hari	%	Jenis Pangan	gram/kap/hari
1.	Padi-padian	30,1	51,0	Beras	21,9
2.	Umbi-umbian	0,4	0,7	Singkong	0,3
3.	Pangan Hewani	18,8	31,9	Ikan	7,6
4.	Minyak dan Lemak	0,0	0,1	Margarin	0,0
5.	Buah/Biji Berminyak	0,2	0,3	Kemiri	0,2
6.	Kacang-kacangan	5,3	9,0	Kacang Kedelai	4,7
7.	Gula	0,1	0,1	Gula Pasir	0,0
8.	Sayur dan Buah	2,8	4,8	Sayur	2,6
9.	Lain-lain	1,3	2,1	Minuman	1,1
Total		59,0	100		

*Keterangan: *) Data diolah berdasarkan data Susenas Tahun 2021*

Data yang disajikan pada Tabel V.B.2 lebih jauh menunjukkan bahwa jenis-jenis pangan yang paling banyak menyumbang protein pada konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Bogor pada tahun 2021 untuk

masing-masing kelompok pangan adalah beras (21,9 gram/kapita/hari) pada kelompok padi-padian, ikan (7,6 gram/kapita/hari) untuk kelompok pangan hewani, dan kacang kedelai (4,7 gram/kapita/hari) untuk kelompok kacang-kacangan. Data yang lebih terperinci tentang rata-rata kontribusi protein konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Bogor pada tahun 2021 menurut kelompok dan jenis pangan dapat dilihat pada Lampiran 2.

Berdasarkan hasil analisis data Susenas sebagaimana disajikan pada Tabel V.B.3, total asupan energi konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Bogor pada Tahun 2021 mencapai sekitar 2.128 kkal/kapita/hari. Hal ini berarti bahwa secara kuantitas konsumsi pangan penduduk di Wilayah Kabupaten Bogor sudah memenuhi Angka Kecukupan Energi (AKE) yang dianjurkan secara nasional berdasarkan WKNPG Tahun 2018 sebesar 2.100 Kkal/kapita/hari, yang berarti Tingkat Kecukupan Energi (TKE) konsumsi pangan penduduk di Wilayah Kabupaten Bogor tahun 2021 mencapai 101,3 %AKE.

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel V.B.3 terlihat juga bahwa kecukupan energi konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2021 paling banyak diperoleh dari kelompok padi-padian, yaitu sekitar 1.269 kkal/kapita/hari (61,7 %AKE). Kelompok pangan lainnya yang memberikan kontribusi energi yang signifikan adalah minyak dan lemak sekitar 292 kkal/kapita/hari (13,9 %AKE) dan pangan hewani sekitar 228 kkal/kapita/hari (10,9 %AKE). Sementara kelompok umbi-umbian, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah serta lain-lain kontribusi energinya relatif kecil.

Tabel V.B.3. Capaian Kecukupan Energi dan Protein Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2021.

No	Kelompok Pangan	Energi		Protein	
		kcal/kap/hari	%AKE	gr/kap/hari	%AKP
1.	Padi-padian	1.295	61,7	29,9	52,5
2.	Umbi-umbian	55	2,6	0,5	0,9
3.	Pangan Hewani	228	10,9	19,3	33,8
4.	Minyak dan Lemak	292	13,9	0,1	0,1
5.	Buah/Biji Berminyak	8	0,4	0,2	0,3
6.	Kacang-kacangan	52	2,5	5,1	8,9
7.	Gula	48	2,3	0,1	0,1
8.	Sayur dan Buah	89	4,3	3,0	5,3
9.	Lain-lain	60	2,8	1,3	2,3
Total		2.128	101,3	59,5	104,4

Keterangan: *) Data diolah berdasarkan data Susenas Tahun 2021

**) Standar AKE sebesar 2100 kkal/Kap/Hari dan AKP sebesar 57 gr/kap/hari

Berdasarkan hasil analisis data Susenas sebagaimana disajikan pada Tabel V.B.3, total asupan protein konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Bogor pada Tahun 2021 mencapai 59,5 gram/kapita/hari. Hal ini berarti bahwa secara kuantitas konsumsi pangan penduduk di Wilayah Kabupaten Bogor sudah memenuhi Angka Kecukupan Protein (AKP) yang dianjurkan secara nasional berdasarkan WKNPG Tahun 2018 sebesar 57 gram/kapita/hari, yang berarti Tingkat Kecukupan Protein (TKP) konsumsi pangan penduduk di Wilayah Kabupaten Bogor tahun 2021 mencapai 104,4 %AKP. Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel V.B.3 terlihat juga bahwa kontribusi protein konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2021 paling banyak diperoleh dari kelompok padi-padian, yaitu sekitar 29,9 gram/kapita/hari (52,5 %AKP) dan pangan hewani sekitar 19,3 gram/kapita/hari (33,8 %AKP). Sementara kelompok kacang-kacangan sebagai sumber protein nabati hanya menyumbang sekitar 5,1 gram/kapita/hari (8,9 %AKP).

C. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Analisis capaian konsumsi pangan penduduk di suatu wilayah dalam rangka mengkaji pencapaian sasaran pembangunan ketahanan pangan tidak cukup hanya ditunjukkan oleh terpenuhinya kuantitas kecukupan gizi konsumsi pangan penduduk. Analisis lebih lanjut perlu dilakukan terhadap kualitas kecukupan gizi, khususnya dinilai dari aspek komposisi atau keragaman dan mutu gizi konsumsi pangan penduduk. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah analisis kualitas konsumsi pangan berdasarkan pendekatan Pola Pangan Harapan (PPH) yang didasarkan pada kontribusi kecukupan konsumsi energi masing-masing kelompok pangan.

Tabel V.C.1. Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2021

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Energi Per Kapita/Hari		Standar PPH**)		Capaian	
		kcal	%AKE*)	Bobot	Skor	Skor AKE	Skor PPH
1.	Padi-padian	1.295	61,7	0,5	25,0	30,8	25,0
2.	Umbi-umbian	55	2,6	0,5	2,5	1,3	1,3
3.	Pangan Hewani	228	10,9	2,0	24,0	21,8	21,8
4.	Minyak dan Lemak	292	13,9	0,5	5,0	7,0	5,0
5.	Buah/Biji Berminyak	8	0,4	0,5	1,0	0,2	0,2
6.	Kacang-kacangan	52	2,5	2,0	10,0	4,9	4,9
7.	Gula	48	2,3	0,5	2,5	1,1	1,1
8.	Sayur dan Buah	89	4,3	5,0	30,0	21,3	21,3
9.	Lain-lain	60	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		2.128	101,3		100,0		80,6

Keterangan: *) Data diolah berdasarkan data Susenas Tahun 2021

**) Dihitung berdasarkan standar AKE sebesar 2100 kkal/Kap/Hari dan standar PPH Nasional

Data yang disajikan pada Tabel V.C.1 menunjukkan bahwa berdasarkan data Susenas Tahun 2021, skor PPH konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Bogor baru mencapai 80.9 jika didasarkan pada AKE sebesar 2.100 Kkal/kapita/hari. Dengan demikian,

secara umum kualitas konsumsi pangan penduduk di Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2021 masih belum mencapai pola konsumsi pangan yang ideal berdasarkan Standar PPH Ideal Nasional dengan skor PPH 100.

Sebagian besar kelompok pangan memiliki kontribusi energi konsumsi pangan yang masih defisit dibandingkan kecukupan energi untuk masing-masing kelompoknya, kecuali untuk kelompok padi-padian serta minyak dan lemak. Hal tersebut menyebabkan skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Bogor untuk hampir semua kelompok pangan masih belum sesuai dengan pola konsumsi pangan yang sesuai dengan standar PPH ideal.

D. Gap Situasi Konsumsi Pangan

Sebagaimana telah dibahas pada sub-bab sebelumnya, masih belum berimbangannya kontribusi energi konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Bogor berdampak pada rendahnya kualitas konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Bogor. Gap analisis situasi konsumsi pangan aktual dengan standar ideal cukup memadai sebagai dasar analisis sasaran konsumsi pangan penduduk di Wilayah Kabupaten Bogor.

Secara umum konsumsi pangan penduduk di Wilayah Kabupaten Bogor sampai Tahun 2021 dapat dikatakan masih rendah kualitasnya. Jika mengacu pada standar Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2100 kkal/kapita/hari, maka skor PPH konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Bogor tahun 2021 masih kekurangan sebanyak 19,4 poin dari skor PPH Ideal sebesar 100 sebagaimana data yang disajikan pada Tabel V.D.1.

Sebagian besar kelompok pangan memiliki kontribusi energi konsumsi pangan yang masih defisit dibandingkan kecukupan energi untuk masing-masing kelompoknya, kecuali untuk kelompok padi-padian serta minyak dan lemak. Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel

V.D.1 secara umum dapat disimpulkan bahwa sejalan dengan pola konsumsinya, maka kontribusi energi konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Bogor untuk semua kelompok pangan masih belum sesuai dengan pola konsumsi pangan yang sesuai dengan standar PPH ideal.

Tabel V.D.1. Gap Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2021

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Per Kapita/Hari		Standar Ideal**)		Gap	
		%AKE*)	Skor PPH	%AKE	Skor PPH	%AKE	Skor PPH
1.	Padi-padian	61,7	25,0	50,0	25,0	11,7	0,0
2.	Umbi-umbian	2,6	1,3	6,0	2,5	-3,4	-1,2
3.	Pangan Hewani	10,9	21,8	12,0	24,0	-1,1	-2,2
4.	Minyak dan Lemak	13,9	5,0	10,0	5,0	3,9	0,0
5.	Buah/Biji Berminyak	0,4	0,2	3,0	1,0	-2,6	-0,8
6.	Kacang-kacangan	2,5	4,9	5,0	10,0	-2,5	-5,1
7.	Gula	2,3	1,1	5,0	2,5	-2,7	-1,4
8.	Sayur dan Buah	4,3	21,3	6,0	30,0	-1,7	-8,7
9.	Lain-lain	2,8	0,0	3,0	0,0	-0,2	0,0
		101,3	80,6	100,0	100,0	1,3	-19,4

Keterangan: *) Angka Kecukupan Energi (AKE) = 2100 kkal/kapita/hari

**) Standar Perhitungan PPH Ideal Nasional

Lebih jauh data yang disajikan pada Tabel V.D.2 menunjukkan bahwa sebagian besar kelompok pangan memiliki kontribusi energi konsumsi pangan yang masih defisit dibandingkan kecukupan energi untuk masing-masing kelompoknya, kecuali untuk kelompok padi-padian, minyak dan lemak dan kelompok lain-lain. Hal tersebut secara otomatis berdampak pada belum bisa tercapainya skor PPH yang ideal untuk masing-masing kelompok pangan tersebut.

Tabel V.D.2. Gap Kontribusi Kecukupan Energi Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2021

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Per Kapita/Hari		Standar Ideal*)		Gap	
		Energi (kkal)	%AKE	Energi (kkal)	%AKE	Energi (kkal)	%AKE
1.	Padi-padian	1.295	61,7	1.050	50,0	245	11,7
2.	Umbi-umbian	55	2,6	126	6,0	-71	-3,4
3.	Pangan Hewani	228	10,9	252	12,0	-24	-1,1
4.	Minyak dan Lemak	292	13,9	210	10,0	82	3,9
5.	Buah/Biji Berminyak	8	0,4	63	3,0	-55	-2,6
6.	Kacang-kacangan	52	2,5	105	5,0	-53	-2,5
7.	Gula	48	2,3	105	5,0	-57	-2,7
8.	Sayur dan Buah	89	4,3	126	6,0	-37	-1,7
9.	Lain-lain	60	2,8	63	3,0	-3	-0,2
		2.128	101,3	2.100	100,0	28	1,3

Keterangan: *) Angka Kecukupan Energi (AKE) 2100 kkal/kapita/hari

Sejalan dengan pola kontribusi energinya, maka berat pangan yang dikonsumsi oleh penduduk di wilayah Kabupaten Bogor untuk semua kelompok pangan masih belum sesuai dengan pola konsumsi pangan sesuai standar PPH ideal. Data yang disajikan pada Tabel V.D.3 tersebut menyajikan perbandingan atau gap antara estimasi rata-rata berat konsumsi per kelompok pangan penduduk di wilayah Kabupaten Bogor tahun 2021 dengan estimasi ideal berat konsumsi pangan masing-masing kelompok pangan berdasarkan standar PPH Nasional dengan AKE sebesar 2100 kkal/kapita/hari.

Mengacu pada data hasil harmonisasi analisis PPH berdasarkan data Susenas tahun 2021, secara umum konsumsi pangan penduduk per kapita di Wilayah Kabupaten Bogor mengalami kelebihan padi-padian sebanyak 22,4 gram/hari atau 8,2 kg/tahun, minyak dan lemak sekitar 6,5 gram/hari atau 2,4 kg/tahun, dan kelompok lain-lain sekitar 62,0 gram/hari atau 22,6 kg/tahun. Sementara itu konsumsi pangan penduduk per kapita untuk kelompok umbi-umbian mengalami defisit yang sangat signifikan, yaitu masing-masing sekitar 45,9 gram/hari atau 16,7 kg/tahun. Demikian pula untuk pangan kelompok pangan hewani yang masih mengalami defisit sekitar 44,2 gram/kapita/hari atau 16,1

kg/kapita/tahun serta sayur dan buah yang defisit sekitar 34,4 gram/kapita/hari atau 12,5 kg/kapita/tahun. Sementara untuk kelompok buah/biji berminyak, kacang-kacangan, dan gula mengalami defisit sekitar 9-18 gram/kapita/hari atau 3-7 kg/kapita/tahun.

Tabel V.D.3. Gap Kuantitas Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2021

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Per Kapita		Estimasi Ideal Per Kapita		Gap	
		gr/hari	kg/tahun	gr/hari	kg/tahun	gr/hari	kg/tahun
1.	Padi-padian	311	113,6	289	105,4	22,4	8,2
2.	Umbi-umbian	49	17,7	95	34,5	-45,9	-16,7
3.	Pangan Hewani	103	37,5	147	53,7	-44,2	-16,1
4.	Minyak dan Lemak	33	12,0	26	9,6	6,5	2,4
5.	Buah/Biji Berminyak	1	0,5	11	3,8	-9,1	-3,3
6.	Kacang-kacangan	26	9,4	37	13,4	-10,9	-4,0
7.	Gula	13	4,6	32	11,5	-18,8	-6,9
8.	Sayur dan Buah	207	75,6	242	88,1	-34,4	-12,5
9.	Lain-lain	78	28,4	16	5,7	62,0	22,6

Keterangan: Estimasi berdasarkan konversi konsumsi energi masing-masing kelompok pangan menjadi berat konsumsi pangan dalam gram/kapita/hari dengan standar AKE sebesar 2100 kkal/kapita/hari

VI. ANALISIS KEBUTUHAN KONSUMSI PANGAN

A. Kebutuhan Konsumsi Pangan Penduduk

Estimasi kebutuhan konsumsi pangan ideal per jenis pangan didasarkan pada persen energi suatu jenis pangan pada kelompok pangan masing-masing dikalikan jumlah energi ideal untuk tiap kelompok dengan asumsi kontribusi antar jenis pangan dalam suatu kelompok tidak berubah. Estimasi berat pangan ideal untuk suatu jenis pangan diperoleh dari hasil konversi estimasi jumlah energi ideal yang berasal dari suatu jenis pangan kedalam berat pangan jenis pangan tersebut. Jumlah kebutuhan konsumsi pangan penduduk tersebut didasarkan pada angka hasil proyeksi konsumsi pangan berdasarkan sasaran skor PPH) ditambah 10 %.

Tabel VI.A.1. Estimasi Kebutuhan Konsumsi Pangan Per Kapita Penduduk di Kabupaten Bogor Tahun 2021

No	Kelompok Pangan	Capaian Per Kapita		Ideal Per Kapita		Gap Per Tahun		
		gr/hari	kg/tahun	gr/hari	kg/tahun	gr/hari	kg/tahun	%
1.	Padi-padian	342,3	124,9	317,6	115,9	24,6	9,0	7,8
2.	Umbi-umbian	53,5	19,5	104,0	37,9	-50,5	-18,4	-48,5
3.	Pangan Hewani	113,1	41,3	161,7	59,0	-48,6	-17,8	-30,1
4.	Minyak dan Lemak	36,0	13,1	28,9	10,5	7,1	2,6	24,8
5.	Buah/Biji Berminyak	1,5	0,5	11,6	4,2	-10,0	-3,7	-87,0
6.	Kacang-kacangan	28,4	10,4	40,4	14,8	-12,0	-4,4	-29,7
7.	Gula	13,9	5,1	34,7	12,6	-20,7	-7,6	-59,8
8.	Sayur dan Buah	227,9	83,2	265,7	97,0	-37,8	-13,8	-14,2
9.	Lain-lain	85,5	31,2	17,3	6,3	68,2	24,9	393,5

Keterangan: Estimasi kebutuhan pangan pada setiap kelompok didasarkan pada rata-rata perkapita konsumsi pangan penduduk ditambah 10%

Hasil analisis terhadap data konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Bogor berdasarkan data Susenas Tahun 2021 menunjukkan bahwa realisasi pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Bogor belum optimal. Sebagaimana disajikan pada Tabel

VI.A.1 kelompok pangan yang pemenuhan kebutuhannya melebihi idealnya berdasarkan Pola Pangan Harapan hanyalah padi-padian (124,9 kg/kapita), minyak & lemak (10,5 kg/kapita), dan kelompok lain-lain (24,9 kg/kapita) per tahun. Sementara kelompok umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, sayur dan buah, dan lain-lain belum mampu memenuhi estimasi idealnya.

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel VI.A.1 untuk mencapai estimasi ideal kebutuhan konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Bogor pada tahun 2021 masih diperlukan tambahan pangan kelompok umbi-umbian (18,4 kg/kapita/tahun), pangan hewani (17,8 kg/kapita), buah/biji berminyak (3,7 kg/kapita), kacang-kacangan (4,4 kg/kapita), gula (7,6 kg/kapita), serta sayur dan buah (13,8 kg/kapita) per tahun. Data lebih detail tentang gap konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Bogor pada tahun 2021 dapat dilihat pada Lampiran 4.

B. Kebutuhan Konsumsi Pangan Wilayah

Estimasi kebutuhan konsumsi pangan wilayah tahun tertentu dihitung berdasarkan perkalian rata-rata kebutuhan konsumsi pangan (kg/kapita/tahun) dengan jumlah penduduk tahun yang sama. Oleh karena itu, realisasi pemenuhan kebutuhan pangan wilayah di Kabupaten Bogor tahun 2021 menunjukkan pola yang sama dengan capaian pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan penduduk perkapita pada tahun yang sama. Berdasarkan data Tabel VI.B.1, kelompok pangan yang realisasi pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan wilayahnya telah melebihi estimasi idealnya berdasarkan Pola Pangan Harapan hanyalah kelompok padi-padian (685,8 ribu ton), minyak dan lemak (72,2 ribu ton), dan kelompok pangan lain (171,3 ribu ton) per tahun.

Tabel VI.B.1. Estimasi Kebutuhan Konsumsi Pangan Penduduk Per Tahun di Kabupaten Bogor Tahun 2021

No	Kelompok Pangan	Capaian Per Tahun		Ideal Per Tahun		Gap Per Tahun		
		kg/kapita	Ribu Ton	kg/kapita	Ribu Ton	kg/kapita	Ribu Ton	%
1.	Padi-padian	124,9	685,8	115,9	636,4	9,0	49,4	7,8
2.	Umbi-umbian	19,5	107,2	37,9	208,3	-18,4	-101,1	-48,5
3.	Pangan Hewani	41,3	226,5	59,0	324,0	-17,8	-97,5	-30,1
4.	Minyak dan Lemak	13,1	72,2	10,5	57,9	2,6	14,3	24,8
5.	Buah/Biji Berminyak	0,5	3,0	4,2	23,1	-3,7	-20,1	-87,0
6.	Kacang-kacangan	10,4	57,0	14,8	81,0	-4,4	-24,0	-29,7
7.	Gula	5,1	27,9	12,6	69,4	-7,6	-41,5	-59,8
8.	Sayur dan Buah	83,2	456,5	97,0	532,3	-13,8	-75,7	-14,2
9.	Lain-lain	31,2	171,3	6,3	34,7	24,9	136,6	393,5

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel VI.B.1 lebih jauh terlihat bahwa untuk dapat mencapai estimasi ideal total kebutuhan konsumsi pangan wilayah di Kabupaten Bogor pada tahun 2021 masih diperlukan tambahan pangan kelompok umbi-umbian (101,1 ribu ton), pangan hewani (97,5 ribu ton), buah/biji berminyak (20,1 ribu ton), kacang-kacangan (24,0 ribu ton), gula (41,5), serta sayur dan buah (75,7 ribu ton) per tahun. Data lebih detail tentang estimasi kebutuhan konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Bogor pada tahun 2021 dapat dilihat pada Lampiran 4.

VII. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Secara umum kuantitas konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Bogor berdasarkan volume atau berat pangan yang dikonsumsi masih kurang dari estimasi ideal konsumsi pada sebagian besar kelompok pangan kecuali pada kelompok padi-padian, minyak & lemak, dan lain-lain. Namun demikian total asupan energi konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Bogor tahun 2021 mencapai 2.128 kkal/kapita/hari (101,3 %AKE). Adapun total asupan protein konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Bogor pada Tahun 2021 mencapai 59,5 gram/kapita/hari (104,4 %AKP). Hal ini berarti bahwa secara kuantitas konsumsi pangan penduduk di Wilayah Kabupaten Bogor sudah cukup baik yang ditunjukkan oleh tingkat kecukupan energi dan protein yang sudah lebih dari 100%.

Meskipun secara kuantitas konsumsi pangan sudah melebihi kecukupannya, namun secara kualitas konsumsi pangan penduduk Kabupaten Bogor tahun 2021 baru mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 80,6 yang berarti masih jauh dari skor PPH ideal sebesar 100.

Hasil analisis terhadap data konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Bogor berdasarkan data Susenas Tahun 2021 menunjukkan bahwa realisasi pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Bogor belum optimal. Kelompok pangan yang pemenuhan kebutuhan konsumsinya melebihi idealnya berdasarkan Pola Pangan Harapan hanyalah padi-padian (124,9 kg/kapita), minyak & lemak (10,5 kg/kapita), dan kelompok lain-lain (24,9 kg/kapita) per tahun. Sementara kelompok umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, sayur dan buah, dan lain-lain belum mampu memenuhi estimasi idealnya. Untuk mencapai estimasi ideal kebutuhan konsumsi

pangan penduduk di Kabupaten Bogor pada tahun 2021 masih diperlukan tambahan pangan kelompok umbi-umbian (18,4 kg/kapita/tahun), pangan hewani (17,8 kg/kapita), buah/biji berminyak (3,7 kg/kapita), kacang-kacangan (4,4 kg/kapita), gula (7,6 kg/kapita), serta sayur dan buah (13,8 kg/kapita) per tahun.

Estimasi kebutuhan konsumsi pangan wilayah tahun tertentu dihitung berdasarkan perkalian rata-rata kebutuhan konsumsi pangan (kg/kapita/tahun) dengan jumlah penduduk tahun yang sama. Oleh karena itu, realisasi pemenuhan kebutuhan pangan wilayah di Kabupaten Bogor tahun 2021 menunjukkan pola yang sama dengan capaian pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan penduduk perkapita pada tahun yang sama. Kelompok pangan yang realisasi pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan wilayahnya telah melebihi estimasi idealnya berdasarkan Pola Pangan Harapan hanyalah kelompok padi-padian (685,8 ribu ton), minyak dan lemak (72,2 ribu ton), dan kelompok pangan lain (171,3 ribu ton) per tahun. Untuk dapat mencapai estimasi ideal kebutuhan konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Bogor pada masih diperlukan tambahan pangan kelompok umbi-umbian (101,1 ribu ton), pangan hewani (97,5 ribu ton), buah/biji berminyak (20,1 ribu ton), kacang-kacangan (24,0 ribu ton), gula (41,5), serta sayur dan buah (75,7 ribu ton) per tahun.

B. Saran

Secara umum, hasil kajian Analisis Capaian Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan Penduduk Kabupaten Bogor Tahun 2021 ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi capaian kinerja pembangunan bidang ketahanan pangan, khususnya dalam upaya perbaikan pola konsumsi dan pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Bogor. Dengan dukungan data dan informasi dari hasil kajian ini diharapkan sinergisitas kebijakan, strategi dan prioritas pembangunan ketahanan pangan, khususnya di bidang konsumsi pangan, di wilayah

Kabupaten Bogor dapat lebih dioptimalkan. Informasi dasar tentang capaian situasi dan estimasi kebutuhan konsumsi pangan penduduk diharapkan dapat dimanfaatkan oleh semua stakeholder terkait pembangunan ketahanan pangan di Wilayah Kabupaten Bogor pada setiap tahapan dan proses pembangunan baik tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Perlu dipahami bahwa estimasi kebutuhan konsumsi pangan hasil analisis dalam kajian ini baru mempertimbangkan kebutuhan pangan untuk konsumsi penduduk di tingkat rumahtangga, sehingga untuk menghitung kebutuhan konsumsi pangan secara keseluruhan perlu ditambah dengan estimasi konsumsi pangan penduduk di luar rumahtangga, khususnya di rumahsakit, hotel dan restoran, lembaga pemasyarakatan, lembaga pendidikan, dan sebagainya. Selain itu, untuk mengestimasi lebih jauh tentang total kebutuhan pangan wilayah harus pula mempertimbangkan kebutuhan pangan wilayah untuk non konsumsi penduduk, seperti : industri, energi alternatif, dan lain-lain. Dengan demikian, analisis tentang kebutuhan pangan akan lebih komprehensif, sehingga dapat mencakup kebutuhan pangan untuk konsumsi penduduk maupun untuk kebutuhan lainnya.

Agar hasil kajian tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dasar pembangunan ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Bogor, maka perlu disinergiskan dengan analisis ketersediaan pangan wilayah. Berdasarkan hasil analisis awal tentang capaian pola konsumsi dan pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan serta ketersediaan pangan wilayah tersebut, maka dapat dilakukan kajian lebih lanjut tentang analisis penyediaan pangan wilayah. Pada analisis tahap ini fokus kajian sudah mensinergiskan antara kebutuhan dan ketersediaan pangan dengan potensi dan daya dukung wilayah, baik potensi agroekologi maupun sosial ekonomi. Selain itu, alangkah lebih baiknya jika dapat kajian mendalam pada sisi preferensi pangan masyarakat untuk menggali lebih jauh berbagai faktor

determinan berperan dalam membentuk pola konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Bogor. Dengan demikian, diharapkan dapat disusun berbagai strategi dan alternatif program ketahanan pangan yang efektif dan efisien pada berbagai tingkat sasaran mulai dari tingkat individu, rumah tangga dan lembaga maupun wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor. 2022. Kabupaten Bogor Dalam Angka Tahun 2023. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, Depok.
- Badan Ketahanan Pangan. 2015. Panduan Penghitungan Pola Pangan Harapan. Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Jakarta.
- Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor. 2022. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Bogor Tahun 2021-2026. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Bogor. Depok.
- Kusumaningrum SP, Syaukat Y, Firdaus M. 2021. Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor. Jurnal Manajemen Agribisnis Volume 9 Nomor 2, Oktober 2021.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pola Konsumsi Pangan Penduduk di Kabupaten Bogor Menurut Kelompok dan Jenis Pangan Tahun 2021

Kelompok dan Jenis Pangan	Berat Konsumsi Per Kapita		
	Gram/Hari	Kg/Tahun	%
1. Padi-Padian			
Beras	257,8	94,1	82,9
Jagung	0,8	0,3	0,3
Terigu	52,5	19,2	16,9
Subtotal	311,1	113,6	100,0
2. Umbi-umbian			
Singkong	29,1	10,6	59,9
Ubi Jalar	10,6	3,9	21,9
Sagu	8,0	2,9	16,4
Kentang	0,2	0,1	0,5
Umbi Lainnya	0,7	0,2	1,4
Subtotal	48,6	17,7	100,0
3. Pangan Hewani			
Daging Ruminansia	17,7	6,5	17,2
Daging Unggas	15,3	5,6	14,9
Telur	22,9	8,4	22,3
Susu	7,2	2,6	7,0
Ikan	39,7	14,5	38,6
Subtotal	102,8	37,5	100,0
4. Minyak dan Lemak			
Minyak Kelapa	5,0	1,8	15,2
Minyak Lainnya	25,9	9,4	79,0
Margarin	1,9	0,7	5,8
Subtotal	32,7	12,0	100,0
5. Buah/Biji Berminyak			
Kelapa	0,6	0,2	41,4
Kemiri	0,8	0,3	58,6
Subtotal	1,4	0,5	100,0
6. Kacang-kacangan			
Kacang Kedelai	23,8	8,7	91,9
Kacang Tanah	0,6	0,2	2,5
Kacang Hijau	1,1	0,4	4,3
Kacang lain	0,3	0,1	1,3
Subtotal	25,8	9,4	100,0
7. Gula			
Gula Pasir	11,6	4,2	91,2
Gula Merah	1,1	0,4	8,8
Subtotal	12,7	4,6	100,0
8. Sayur dan Buah			
Sayur	135,3	49,4	65,3
Buah	71,8	26,2	34,7
Subtotal	207,1	75,6	100,0
9. Lain-lain			
Minuman	69,8	25,5	89,8
Bumbu	7,9	2,9	10,2
Subtotal	77,7	28,4	100,0

Lampiran 2. Kontribusi Gizi Konsumsi Pangan Penduduk di Kabupaten Bogor Menurut Kelompok dan Jenis Pangan Tahun 2021

Kelompok dan Jenis Pangan	Kontribusi Energi		Kontribusi Protein	
	Kkal/Kap/Hari	%	Gram/Kap/Hari	%
1. Padi-Padian				
Beras	922,1	71,2	21,9	73,2
Jagung	1,2	0,1	0,0	0,1
Terigu	371,9	28,7	8,0	26,7
Subtotal	1.295,2	100,0	29,9	100,0
2. Umbi-umbian				
Singkong	36,0	65,2	0,3	48,5
Ubi Jalar	13,6	24,6	0,1	23,2
Sagu	4,2	7,5	0,1	26,1
Kentang	0,7	1,3	0,0	0,2
Umbi Lainnya	0,8	1,4	0,0	1,9
Subtotal	55,3	100,0	0,5	100,0
3. Pangan Hewani				
Daging Ruminansia	40,0	17,5	2,0	10,2
Daging Unggas	80,4	35,2	6,1	31,6
Telur	31,4	13,8	2,5	13,1
Susu	31,2	13,6	1,1	5,5
Ikan	45,4	19,9	7,6	39,7
Subtotal	228,4	100,0	19,3	100,0
4. Minyak dan Lemak				
Minyak Kelapa	43,2	14,8	0,0	60,8
Minyak Lainnya	233,5	79,9	-	-
Margarin	15,6	5,3	0,0	39,2
Subtotal	292,3	100,0	0,1	100,0
5. Buah/Biji Berminyak				
Kelapa	3,0	37,3	0,0	15,9
Kemiri	5,1	62,7	0,2	84,1
Subtotal	8,1	100,0	0,2	100,0
6. Kacang-kacangan				
Kacang Kedelai	45,6	88,5	4,7	92,3
Kacang Tanah	2,9	5,7	0,2	3,2
Kacang Hijau	2,0	3,9	0,2	3,2
Kacang lain	1,0	1,9	0,1	1,3
Subtotal	51,5	100,0	5,1	100,0
7. Gula				
Gula Pasir	43,3	91,1	0,0	50,5
Gula Merah	4,2	8,9	0,0	49,5
Subtotal	47,6	100,0	0,1	100,0
8. Sayur dan Buah				
Sayur	50,0	55,8	2,6	85,4
Buah	39,5	44,2	0,4	14,6
Subtotal	89,5	100,0	3,0	100,0
9. Lain-lain				
Minuman	54,7	91,4	1,1	85,3
Bumbu	5,1	8,6	0,2	14,7
Subtotal	59,8	100,0	1,3	100,0

Lampiran 3. Gap Konsumsi Pangan Penduduk di Kabupaten Bogor Menurut Kelompok dan Jenis Pangan Tahun 2021

Kelompok dan Jenis Pangan	Konsumsi Per Kapita		Estimasi Ideal Per Kapita		Gap Konsumsi Per Kapita		
	Gram/Hari	Kg/Tahun	Gram/Hari	Kg/Tahun	Gram/Hari	Kg/Tahun	%
1. Padi-Padian							
Beras	257,8	94,1	239,2	87,3	18,6	6,8	7,8
Jagung	0,8	0,3	0,8	0,3	0,1	0,0	7,8
Terigu	52,5	19,2	48,7	17,8	3,8	1,4	7,8
Subtotal	311,1	113,6	288,8	105,4	22,4	8,2	7,8
2. Umbi-umbian							
Singkong	29,1	10,6	56,6	20,7	(27,5)	(10,0)	(48,5)
Ubi Jalar	10,6	3,9	20,7	7,5	(10,0)	(3,7)	(48,5)
Sagu	8,0	2,9	15,5	5,7	(7,5)	(2,7)	(48,5)
Kentang	0,2	0,1	0,4	0,2	(0,2)	(0,1)	(48,5)
Umbi Lainnya	0,7	0,2	1,3	0,5	(0,6)	(0,2)	(48,5)
Subtotal	48,6	17,7	94,5	34,5	(45,9)	(16,7)	(48,5)
3. Pangan Hewani							
Daging Ruminansia	17,7	6,5	25,3	9,2	(7,6)	(2,8)	(30,1)
Daging Unggas	15,3	5,6	21,9	8,0	(6,6)	(2,4)	(30,1)
Telur	22,9	8,4	32,7	12,0	(9,8)	(3,6)	(30,1)
Susu	7,2	2,6	10,4	3,8	(3,1)	(1,1)	(30,1)
Ikan	39,7	14,5	56,7	20,7	(17,1)	(6,2)	(30,1)
Subtotal	102,8	37,5	147,0	53,7	(44,2)	(16,1)	(30,1)
4. Minyak dan Lemak							
Minyak Kelapa	5,0	1,8	4,0	1,5	1,0	0,4	24,8
Minyak Lainnya	25,9	9,4	20,8	7,6	5,1	1,9	24,8
Margarin	1,9	0,7	1,5	0,6	0,4	0,1	24,8
Subtotal	32,7	12,0	26,3	9,6	6,5	2,4	24,8
5. Buah/Biji Berminyak							
Kelapa	0,6	0,2	4,4	1,6	(3,8)	(1,4)	(87,0)
Kemiri	0,8	0,3	6,1	2,2	(5,3)	(2,0)	(87,0)
Subtotal	1,4	0,5	10,5	3,8	(9,1)	(3,3)	(87,0)
6. Kacang-kacangan							
Kacang Kedelai	23,8	8,7	33,8	12,3	(10,0)	(3,7)	(29,7)
Kacang Tanah	0,6	0,2	0,9	0,3	(0,3)	(0,1)	(29,7)
Kacang Hijau	1,1	0,4	1,6	0,6	(0,5)	(0,2)	(29,7)
Kacang lain	0,3	0,1	0,5	0,2	(0,1)	(0,0)	(29,7)
Subtotal	25,8	9,4	36,8	13,4	(10,9)	(4,0)	(29,7)
7. Gula							
Gula Pasir	11,6	4,2	28,7	10,5	(17,2)	(6,3)	(59,8)
Gula Merah	1,1	0,4	2,8	1,0	(1,7)	(0,6)	(59,8)
Subtotal	12,7	4,6	31,5	11,5	(18,8)	(6,9)	(59,8)
8. Sayur dan Buah							
Sayur	135,3	49,4	157,8	57,6	(22,4)	(8,2)	(14,2)
Buah	71,8	26,2	83,7	30,6	(11,9)	(4,3)	(14,2)
Subtotal	207,1	75,6	241,5	88,1	(34,4)	(12,5)	(14,2)
9. Lain-lain							
Minuman	69,8	25,5	14,1	5,2	55,7	20,3	393,5
Bumbu	7,9	2,9	1,6	0,6	6,3	2,3	393,5
Subtotal	77,7	28,4	15,8	5,7	62,0	22,6	393,5

Lampiran 4. Estimasi Kebutuhan Konsumsi Pangan Penduduk Kabupaten Bogor Menurut Kelompok dan Jenis Pangan Tahun 2021

Kelompok dan Jenis Pangan	Kebutuhan Per Tahun		Estimasi Ideal Per Tahun		Gap Kebutuhan Konsumsi		
	Kg/Kapita	Ribu Ton	Kg/Tahun	Ribu Ton	Kg/Kapita	Ribu Ton	%
1. Padi-Padian							
Beras	103,5	568,2	96,1	527,3	7,4	40,9	7,8
Jagung	0,3	1,8	0,3	1,7	0,0	0,1	7,8
Terigu	21,1	115,8	19,6	107,4	1,5	8,3	7,8
Subtotal	124,9	685,8	115,9	636,4	9,0	49,4	7,8
2. Umbi-umbian							
Singkong	11,7	64,2	22,7	124,8	(11,0)	(60,6)	(48,5)
Ubi Jalar	4,3	23,4	8,3	45,5	(4,0)	(22,1)	(48,5)
Sagu	3,2	17,6	6,2	34,2	(3,0)	(16,6)	(48,5)
Kentang	0,1	0,5	0,2	0,9	(0,1)	(0,5)	(48,5)
Umbi Lainnya	0,3	1,5	0,5	2,9	(0,3)	(1,4)	(48,5)
Subtotal	19,5	107,2	37,9	208,3	(18,4)	(101,1)	(48,5)
3. Pangan Hewani							
Daging Ruminansia	7,1	39,0	10,2	55,8	(3,1)	(16,8)	(30,1)
Daging Unggas	6,1	33,7	8,8	48,2	(2,6)	(14,5)	(30,1)
Telur	9,2	50,5	13,1	72,2	(4,0)	(21,7)	(30,1)
Susu	2,9	16,0	4,2	22,8	(1,3)	(6,9)	(30,1)
Ikan	15,9	87,4	22,8	125,0	(6,8)	(37,6)	(30,1)
Subtotal	41,3	226,5	59,0	324,0	(17,8)	(97,5)	(30,1)
4. Minyak dan Lemak							
Minyak Kelapa	2,0	10,9	1,6	8,8	0,4	2,2	24,8
Minyak Lainnya	10,4	57,1	8,3	45,7	2,1	11,3	24,8
Margarin	0,8	4,2	0,6	3,3	0,2	0,8	24,8
Subtotal	13,1	72,2	10,5	57,9	2,6	14,3	24,8
5. Buah/Biji Berminyak							
Kelapa	0,2	1,2	1,7	9,6	(1,5)	(8,3)	(87,0)
Kemiri	0,3	1,8	2,5	13,6	(2,1)	(11,8)	(87,0)
Subtotal	0,5	3,0	4,2	23,1	(3,7)	(20,1)	(87,0)
6. Kacang-kacangan							
Kacang Kedelai	9,5	52,4	13,6	74,5	(4,0)	(22,1)	(29,7)
Kacang Tanah	0,3	1,4	0,4	2,0	(0,1)	(0,6)	(29,7)
Kacang Hijau	0,4	2,4	0,6	3,5	(0,2)	(1,0)	(29,7)
Kacang lain	0,1	0,7	0,2	1,0	(0,1)	(0,3)	(29,7)
Subtotal	10,4	57,0	14,8	81,0	(4,4)	(24,0)	(29,7)
7. Gula							
Gula Pasir	4,6	25,5	11,5	63,3	(6,9)	(37,8)	(59,8)
Gula Merah	0,5	2,5	1,1	6,1	(0,7)	(3,7)	(59,8)
Subtotal	5,1	27,9	12,6	69,4	(7,6)	(41,5)	(59,8)
8. Sayur dan Buah							
Sayur	54,3	298,2	63,3	347,7	(9,0)	(49,5)	(14,2)
Buah	28,8	158,3	33,6	184,6	(4,8)	(26,3)	(14,2)
Subtotal	83,2	456,5	97,0	532,3	(13,8)	(75,7)	(14,2)
9. Lain-lain							
Minuman	28,0	153,9	5,7	31,2	22,4	122,7	393,5
Bumbu	3,2	17,4	0,6	3,5	2,5	13,9	393,5
Subtotal	31,2	171,3	6,3	34,7	24,9	136,6	393,5